



Katalog BPS : 4611.

(Survei Sosial Ekonomi Nasional)

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2006



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA

2006

<http://www.bps.go.id>

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2006

ISBN. 978-979-724-600-6

No. Publikasi : 04220.0704

Katalog BPS : 4611.

Ukuran Buku : 21 Cm x 28 Cm

Jumlah Halaman : 150 halaman

Naskah :

Subdit Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Gambar Kulit :

Subdit Publikasi Statistik

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh :

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Penduduk lanjut usia (lansia) merupakan bagian dari penduduk yang masih terabaikan, mungkin karena generasi ini dianggap sudah tidak maksimal berperan serta dalam pembangunan dibanding kelompok umur yang lebih muda. Memperhatikan kondisi sosial ekonomi, termasuk derajat kesehatan dan tingkat produktifitas penduduk lansia pada umumnya berbeda dengan kondisi sosial ekonomi penduduk pada kelompok umur yang lebih muda maka kebijakan pembangunan bagi penduduk lansia perlu mendapat perhatian khusus.

Publikasi mengenai penduduk lansia bertujuan untuk memberi gambaran mengenai penduduk lansia di Indonesia. Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2006 ini menyajikan antara lain data ciri-ciri demografi, tingkat pendidikan, kegiatan sosial-ekonomi, derajat kesehatan dan dilengkapi pula laporan hasil wawancara dengan dinas sosial dan panti werdha di beberapa daerah. Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi ini secara keseluruhan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2006 kor dan modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP).

Kepada semua pihak dan Tim Penyusun yang telah memberikan kontribusinya dalam proses penyusunan publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang sangat diharapkan.

Jakarta, September 2007
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan
NIP. 340003999

Ringkasan Eksekutif

Kualitas kesehatan yang semakin baik berdampak pada semakin meningkatnya angka harapan hidup dan tentunya jumlah lansia akan semakin bertambah. Hasil Susenas 2006 menunjukkan bahwa penduduk lansia Indonesia telah mencapai 17,5 juta orang atau sekitar 7,90 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Sebagian besar (61,63 persen) penduduk lansia tinggal di daerah perdesaan, sedangkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan hanya 38,37 persen. Bila dilihat menurut jenis kelamin, lebih dari separuh (52,40 persen) penduduk lansia Indonesia adalah perempuan dan sebesar 47,60 persen lainnya adalah laki-laki. Proporsi penduduk lansia sangat bervariasi antar wilayah provinsi di Indonesia. Proporsi (persentase) tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (14,16 persen) dan yang terendah berada di Provinsi Papua (1,74 persen).

Pertambahan penduduk lansia berdampak pada angka rasio ketergantungan penduduk tua. Dalam kurun waktu 1990-2006 telah terjadi peningkatan rasio ketergantungan penduduk tua terhadap penduduk usia produktif baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Angka rasio ketergantungan penduduk tua meningkat dari sebesar 11,03 pada tahun 1990 menjadi sebesar 11,51 pada tahun 2000 dan meningkat lagi pada tahun 2006 menjadi sebesar 12,37. Angka rasio sebesar 12,37 ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 12 orang penduduk lansia.

Tingkat pendidikan lansia secara umum masih sangat rendah, yaitu tercermin dari masih tingginya persentase penduduk lansia yang berpendidikan hanya sampai SD dan

semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan persentasenya semakin menurun. Penduduk lansia yang berhasil menamatkan pendidikan SD sekitar 21,27 persen, bahkan banyak yang tidak menamatkan SD dan yang tidak/belum pernah sekolah yaitu masing-masing 30,77 persen dan 35,53 persen. Di sisi lain, penduduk lansia yang menamatkan pendidikan SLTP ke atas kurang dari 5 persen. Kondisi ini hampir berlaku di semua provinsi. Persentase tertinggi lansia yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (61,69 persen), sebaliknya persentase penduduk lansia terendah yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara (2,39 persen).

Rendahnya tingkat pendidikan lansia juga terlihat dari masih banyaknya penduduk lansia yang belum mampu membaca dan menulis. Dari keseluruhan lansia sekitar 35,87 persen diantaranya masih buta huruf. Dilihat dari status ekonomi rumah tangga, persentase penduduk lansia buta huruf tertinggi (45,71 persen) berada pada kelompok 40 persen rumah tangga yang berpendapatan terendah. Angka buta huruf lansia tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (61,89 persen) dan terendah berada di Provinsi Sulawesi Utara (3,25 persen).

Lebih dari separuh lansia (51,36 persen) mengalami keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu. Provinsi dengan persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan paling tinggi adalah Provinsi Gorontalo (65,40 persen) dan yang terendah di Provinsi Irian Jaya Barat (40,53 persen). Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dialami berturut-turut adalah batuk (46,58 persen), pilek (30,23 persen), panas (21,30 persen) dan sakit gigi (4,16 persen). Pola yang sama terjadi pada penduduk lansia laki-laki dan perempuan, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Angka kesakitan (keluhan kesehatan yang mengakibatkan aktifitas sehari-harinya menjadi terganggu) cukup tinggi yaitu sebesar 64,58 persen. Dari seluruh penduduk lansia yang sakit, hampir tiga perempatnya (74,15 persen) mengalami sakit tidak lebih dari seminggu dan sisanya sebesar 25,85 persen penduduk lansia menderita sakit sekitar 8 - 30 hari. Penduduk lansia yang sakit dan melakukan cara penyembuhan dengan berobat sendiri sebagian besar (44,75 persen) menggunakan jenis obat modern, sedangkan mereka yang memakai obat tradisional sekitar 13,75 persen. Di sisi lain, penduduk lansia yang sakit juga ada yang melakukan penyembuhan dengan berobat jalan.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang paling diminati oleh penduduk lansia untuk berobat jalan berturut-turut adalah puskesmas/puskesmas pembantu (pustu) sebesar 40,89 persen, kemudian tempat praktek dokter sebesar 27,27 persen dan praktek tenaga kesehatan (nakes) sebesar 25,93 persen.

Perbandingan antara angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Secara nasional TPAK penduduk lansia adalah sebesar 49,16 persen. TPAK penduduk lansia di daerah perdesaan (53,75 persen) nampak lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan (41,80 persen). TPAK penduduk lansia laki-laki lebih tinggi dibanding dengan penduduk lansia perempuan (66,49 persen berbanding dengan 33,42 persen). TPAK penduduk lansia tertinggi terdapat di Provinsi Papua (61,17 persen) dan terendah terdapat di Kepulauan Riau (35,52 persen).

Dalam mengisi waktu luangnya, banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh para lansia. Salah satunya adalah kegiatan membaca, secara umum minat baca para lansia masih sangat rendah. Dari seluruh populasi lansia, hanya sebesar 9,36 persen lansia yang melakukan kegiatan membaca surat kabar. Sementara itu, lansia yang membaca majalah, buku pengetahuan dan buku cerita juga relatif sangat sedikit, yaitu berturut-turut 2,58 persen, 2,45 persen dan 0,40 persen. Kegiatan yang cenderung disukai oleh sebagian besar penduduk lansia (67,86 persen) adalah menonton televisi. Di sisi lain, banyak pula penduduk lansia (69,41 persen) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan selama tiga bulan terakhir. Jenis kegiatan sosial yang diikuti oleh lebih dari separuh (55,27 persen) penduduk lansia adalah keagamaan. Selain itu, kegiatan yang juga banyak diminati penduduk lansia adalah kegiatan kematian (43,50 persen) dan sosial (23,90 persen).

Dilihat menurut kategori keterlantaran, dari keseluruhan penduduk lansia di Indonesia tahun 2006 yang berjumlah sekitar 17,5 juta jiwa, 15,28 persen diantaranya termasuk kategori lansia terlantar, 58,09 persen termasuk kategori lansia tidak terlantar, dan sisanya 26,63 persen termasuk kategori lansia hampir terlantar. Persentase tertinggi lansia terlantar berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (48,37 persen) dan yang terendah di Provinsi Bangka Belitung (7,31 persen). Kelompok rumah tangga

berpendapatan rendah lebih berpotensi untuk membentuk lansia terlantar dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan lebih tinggi. Hal ini terlihat dari proporsi lansia terlantar untuk kelompok 40 persen rumah tangga berpengeluaran menengah dan kelompok 40 persen berpengeluaran rendah mencapai sebesar 34,97 persen dan 50,72 persen, sedangkan proporsi jumlah lansia terlantar pada kelompok 20 persen rumah tangga berpengeluaran tinggi hanya sebesar 14,31 persen.

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Sistematika Penyajian	4
BAB II METODOLOGI	7
2.1. Sumber Data	7
2.1.1. Ruang Lingkup	8
2.1.2. Kerangka Sampel	9
2.1.3. Rancangan Penarikan Sampel	9
2.1.4. Metode Pengumpulan Data	10
2.1.5. Petugas Lapangan	11
2.2. Konsep dan Definisi	11
2.2.1. Tipe Daerah	11
2.2.2. Blok Sensus	13
2.2.3. Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga	14
2.3. Keterbatasan Data	20
2.4. Metode Analisis	20

	Halaman
BAB III STRUKTUR DEMOGRAFIS PENDUDUK LANSIA	23
3.1. Perkembangan Struktur Penduduk Indonesia	24
3.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Tua	27
3.3. Distribusi dan Komposisi Penduduk Lanjut Usia	28
3.4. Peranan Penduduk Lansia di Dalam Rumah Tangga	31
BAB IV PENDIDIKAN PENDUDUK LANSIA	35
4.1. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	36
4.2. Kemampuan Membaca dan Menulis	39
BAB V KESEHATAN PENDUDUK LANSIA	45
5.1. Keluhan Kesehatan	46
5.2. Angka Kesakitan	49
5.3. Lama Sakit	50
5.4. Cara Berobat	52
BAB VI KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK LANSIA	59
6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Lansia	61
6.2. Lapangan Usaha	62
6.3. Status Pekerjaan	64
6.4. Jumlah Jam Kerja	66
BAB VII KEGIATAN SOSIAL PENDUDUK LANSIA	71
7.1. Akses Terhadap Media Massa	72
7.1.1. Kegiatan Membaca	72
7.1.2. Menonton Televisi dan Pertunjukan Kesenian	74
7.1.3. Mendengarkan Radio	76
7.2. Partisipasi Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	77

	Halaman
BAB VIII PENDUDUK LANSIA TERLANTAR	83
8.1. Distribusi Lansia Terlantar	84
8.2. Hubungan Karakteristik Rumah Tangga dengan Keterlantaran Lansia	86
BAB IX PELAYANAN SOSIAL BAGI LANSIA (HASIL KUNJUNGAN KE DAERAH)	91
9.1. Pelayanan Panti Werdha (Hasil kunjungan ke Panti Werdha)	91
9.2. Pelayanan Dinas Sosial Setempat (Hasil kunjungan ke Dinas Sosial)	94
TABEL LAMPIRAN	97
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Piramida Penduduk Tahun 1990	25
3.2	Piramida Penduduk Tahun 1995	26
3.3	Piramida Penduduk Tahun 2006	27
3.4	Persentase Penduduk Lansia menurut Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2006	32
4.1	Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2006	38
4.2	Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2005 dan 2006	40
5.1	Persentase Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2006	47
5.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2006	49
6.1	TPAK Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2006	61
6.2	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kelompok Lapangan Usaha, Tahun 2006	64
6.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, Tahun 2005 dan 2006	66
6.4	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, Tahun 2006	67
7.1	Persentase Penduduk Lansia yang Menonton Televisi Seminggu Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2006	74

Gambar		Halaman
7.2	Persentase Penduduk Lansia yang Mendengarkan Radio Selama Seminggu Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2006	77
7.3	Persentase Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2006	78

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.a	Angka Rasio Ketergantungan Penduduk Tua menurut Tipe Daerah, Tahun 1990, 1995, 2000 dan 2006	28
3.b	Jumlah dan Proporsi Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2006	29
3.c	Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, Tahun 2006	30
4.a	Persentase Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2005 dan 2006	37
4.b	Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Status Ekonomi Rumah Tangga dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Tahun 2006	41
5.a	Proporsi Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Keluhan, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2006	48
5.b	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, Tahun 2006	51
5.c	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Jenis Obat yang Digunakan dan Tipe Daerah, Tahun 2006	52
5.d	Proporsi Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah, Tahun 2006	54
6.a	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, Tahun 2005 dan 2006	62
6.b	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan, Tahun 2006	65
7.a	Proporsi Penduduk Lansia yang Membaca Surat Kabar, Majalah, Buku Cerita dan Buku Pengetahuan Selama Seminggu Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Bacaan, Tahun 2006	73

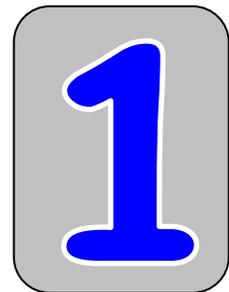
Tabel		Halaman
7.b	Proporsi Penduduk Lansia yang Menonton Pertunjukan Kesenian Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Pertunjukan, Tahun 2006	75
7.c	Proporsi Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Organisasi, Tahun 2006	79
8.a	Jumlah (dalam Ribuan) dan Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kategori Keterlantaran, Tahun 2006	85
8.b	Persentase Penduduk Lansia menurut Status Ekonomi Rumah Tangga dan Kategori Keterlantaran, Tahun 2006	86

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel		Halaman
3.1.1 - 3.1.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2006	97 – 99
3.2	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2006	100
3.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2006	101
3.4	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2006	102
4.1.1 – 4.1.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2006	103 – 105
4.2.1 – 4.2.9	Persentase Penduduk Lansia menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Provinsi, 2006	106 – 114
4.3	Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Golongan Ekonomi Rumah Tangga, 2006	115
5.1	Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2006	116
5.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2006	117
5.3.1 – 5.3.3	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Hari Sakit (hari), 2006	118 – 120
5.4	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2006	121
5.5.1 – 5.5.3	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan, 2006	122 – 124
5.6	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2006	125

Tabel		Halaman
5.7.1 – 5.7.3	Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2006	126 – 128
6.1	TPAK Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2006	129
6.2.1 – 6.2.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, 2006	130 – 132
6.3.1 – 6.3.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2006	133 – 135
6.4.1 – 6.4.3	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, 2006	136 – 138
7.1.1 – 7.1.3	Proporsi Penduduk Lansia yang Membaca Surat Kabar, Majalah, Buku Cerita dan Buku Pengetahuan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2006	139 – 141
7.2	Persentase Penduduk Lansia yang Menonton Televisi menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2006	142
7.3	Persentase Penduduk Lansia yang Mendengarkan Radio menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2006	143
7.4.1 – 7.4.3	Proporsi Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan, 2006	144 – 146
8.1.1 – 8.1.3	Persentase Lansia menurut Provinsi dan Kategori Keterlantaran, 2006	147 – 149



Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Tumbuh kembang manusia dimulai dari janin dalam tubuh seorang wanita hingga usia senja. Setiap perkembangan ditandai dengan ciri tersendiri. Ciri dengan wajah keriput, rambut memutih dan usia mendekati senja, mereka inilah yang dalam terminologi umum masuk kategori lanjut usia (lansia). Penduduk yang termasuk kategori lansia memiliki berbagai keterbatasan, karenanya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan untuk mengisi kehidupannya. Dengan semakin membaiknya kualitas kesehatan berdampak pada semakin meningkatnya angka harapan hidup dan tentunya jumlah lansia akan semakin bertambah.

Bertambahnya jumlah lansia mendapat perhatian khusus oleh dunia internasional. Salah satu bentuk kepedulian internasional terhadap lansia adalah adanya resolusi PBB No 045/206 tahun 1991 mengenai penetapan 1 Oktober sebagai "*International Day for*

the Elderly". Hal ini merupakan tindak lanjut *Vienna Plan of Action on Aging* tahun 1982 yang melahirkan kesepakatan untuk mengundang bangsa-bangsa (negara) yang belum menetapkan hari bagi lanjut usia. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti resolusi PBB tersebut dengan menetapkan hari lansia di Indonesia jatuh pada setiap tanggal 29 Mei. Pencanangan hari lanjut usia pertama jatuh pada 29 Mei 1996 yang ditandai dengan seminar sehari dengan tema "Hari Lanjut Usia Nasional".

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap lansia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Di dalam UU tersebut dinyatakan pengertian lanjut usia, yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Arah agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraannya. Tujuan dari semua ini adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di dalam UU tersebut juga dituangkan bahwa lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan yang antara lain meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan pelatihan; kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; perlindungan sosial; bantuan sosial. Tentunya selain dari hak lansia juga seyogyanya punya kewajiban diantaranya membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya; mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus (<http://www.menkokesra.go.id>; 17 Mei, 2007, 18:02).

Sebagai penjabaran konkrit dari UU mengenai kesejahteraan lansia diterbitkanlah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, Keputusan Presiden Nomor 93/M Tahun 2005 Tentang Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia.

Sejak 1980-2000 di Indonesia telah terjadi penambahan usia harapan hidup dari rata-rata 52,2 tahun pada tahun 1980 menjadi rata-rata 64,5 tahun pada tahun 2000 bahkan diprediksikan menjadi rata-rata 67,4 tahun pada tahun 2010 dan rata-rata 71,1 tahun pada tahun 2020. Dengan meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia, tentu akan terjadi pertambahan jumlah penduduk lansia di Indonesia. Pada gilirannya hal ini akan membawa konsekuensi upaya yang lebih keras dari pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lansia yang berkaitan dengan kehidupan lansia seperti di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan rohani (http://www.waspada.co.id/serba_serbi/kesehatan). Pertambahan penduduk lansia di Indonesia juga mengundang pendapat para pakar sosial, antara lain menurut Suwoko (2004) abad 21 bagi bangsa Indonesia merupakan abad lansia (*era of population ageing*), karena pertumbuhan penduduk lansia di Indonesia diperkirakan lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut Suwoko pula, Indonesia pada dua dekade permulaan abad 21 ini diperkirakan akan mengalami *age population boom*.

Arah dan strategi pembangunan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk lansia sebaiknya dilakukan secara terpadu dan lintas sektor. Sejalan dengan itu, tersedianya data statistik dan berbagai indikator yang dapat memberikan gambaran secara makro mengenai kondisi dan potensi penduduk lansia pada berbagai aspek penting seperti demografis, pendidikan, ekonomi dan kesehatan, baik pada level nasional maupun provinsi akan sangat membantu mempertajam arah dan sasaran pembangunan dan pemberdayaan penduduk lansia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi ini adalah menyajikan gambaran secara makro mengenai kondisi dan situasi penduduk lansia Indonesia yang dilihat dari berbagai aspek penting, antara lain struktur demografis, pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial.

Selain itu disajikan pula gambaran mengenai penduduk lansia terlantar yang dikaitkan dengan status ekonomi dan sosialnya.

Gambaran mengenai situasi dan kondisi penduduk lansia Indonesia dalam publikasi ini disajikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi, dibedakan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Diharapkan penyajian publikasi ini dapat berguna terutama bagi para peneliti, perencana dan pengambil keputusan di bidang sosial dan kependudukan, khususnya yang berorientasi pada penduduk lansia.

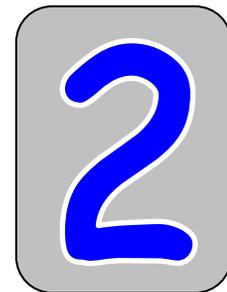
1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia Tahun 2006 ini disajikan dalam sembilan bagian. Ringkasan eksekutif di bagian awal publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas dan menyeluruh kepada pembaca atas keseluruhan kandungan publikasi ini. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan fenomena-fenomena yang melatarbelakangi penyusunan publikasi ini; maksud dan tujuan; serta sistematika penyajian. Kemudian pada bagian kedua (Bab II) disajikan metodologi berupa sumber data; ruang lingkup; keterbatasan data; serta konsep dan definisi.

Tujuh bagian berikutnya menyajikan gambaran mengenai situasi dan kondisi penduduk lansia di Indonesia, diawali pada bagian ketiga (Bab III) berupa kajian mengenai struktur demografis penduduk lansia, bagian keempat (Bab IV) mengenai kemampuan baca tulis dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk lansia, bagian kelima (Bab V) mengenai kondisi kesehatan penduduk lansia, dan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan; bagian keenam (Bab VI) adalah mengenai kegiatan lansia yang bekerja, lapangan usaha, status pekerjaan serta jam kerja penduduk lansia yang bekerja, bagian ke tujuh (Bab VII) adalah mengenai partisipasi penduduk lansia dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, bagian ke delapan (Bab VIII) disajikan gambaran mengenai kondisi penduduk lansia yang terlantar yakni penduduk lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal untuk dapat hidup secara layak. Pada bagian terakhir publikasi ini (Bab IX) disajikan laporan hasil kunjungan dan wawancara ke Panti Werdha dan Dinas Sosial yang ada di daerah.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



Metodologi

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006 yang mencakup dua jenis data yaitu:

- a. Data Kor Susenas tahun 2006, yang digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan gambaran makro mengenai kondisi dan potensi penduduk lanjut usia (lansia) yang dilihat dari aspek demografis, kesehatan, ketenagakerjaan dan pendidikan.
- b. Data Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, Susenas 2006, yang digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan gambaran makro mengenai kegiatan sosial budaya yang dilakukan oleh penduduk lansia.

BPS setiap tahun menyelenggarakan Susenas. Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi. Karena luasnya cakupan data yang harus dikumpulkan, pertanyaan-pertanyaan dalam Susenas dikelompokkan menjadi

dua kelompok, yaitu Kor dan Modul. Kor hanya dibatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok namun mencakup keseluruhan aspek sosial ekonomi (diselenggarakan setiap tahun), sedangkan modul Susenas mencakup pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci dari salah satu aspek sosial ekonomi. Secara keseluruhan, Susenas mempunyai tiga modul yaitu Modul Konsumsi/Pengeluaran, Modul Kesehatan dan Perumahan serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan. Pengumpulan data modul dilakukan secara bergiliran setiap tiga tahun sekali.

Modul Sosial Budaya dan Pendidikan Susenas 2006 memuat beberapa keterangan, diantaranya keterangan penduduk semua kelompok umur tentang penyandang cacat/disabilitas, keluhan kesehatan, ketersediaan pakaian yang layak, kemampuan makan makanan pokok dan ketersediaan tempat tetap untuk tidur, keterangan penduduk berumur 0-4 tahun tentang ada tidaknya aktivitas ibu dari balita di luar rumah, keterangan penduduk 5-21 tahun dan belum kawin tentang kegiatan yang biasa dilakukan bersama orang tua/wali, keterangan penduduk 5 tahun ke atas yang mencakup kegiatan mendengarkan radio, menonton TV, aktivitas membaca, partisipasi kursus, menonton/melakukan pertunjukan kesenian/pameran, olah raga dan keterangan pendidikan bagi yang masih sekolah, serta keterangan penduduk 10 tahun ke atas tentang partisipasi kegiatan sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial. Berikut ini adalah ruang lingkup survei, kerangka sampel, rancangan sampel, metode pengumpulan data, dan petugas lapangan sehubungan dengan kegiatan Susenas 2006.

2.1.1 Ruang Lingkup

Susenas 2006 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 278.352 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 209.552 rumah tangga dicacah dengan kuesioner kor (VSEN2006.K) saja dan selebihnya yaitu sebanyak 68.800 rumah tangga selain dicacah dengan kuesioner kor, juga dicacah dengan kuesioner modul sosial budaya dan pendidikan (VSEN2006.MSBP). Rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Data yang dihasilkan dari sampel kor representatif disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota asal tidak dibedakan menurut tipe daerah, sedangkan data dari sampel modul hanya representatif sampai dengan tingkat provinsi, tetapi dapat dibedakan menurut tipe daerah (perkotaan/perdesaan).

2.1.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam Susenas 2006 terdiri dari 3 jenis, yaitu: kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel untuk pemilihan sub blok sensus (khusus untuk blok sensus yang mempunyai jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumahtangga atau blok sensus yang telah dibuat sub-blok sensusnya pada saat *up-dating* sketsa peta blok sensus dalam rangka kegiatan Sensus Pertanian 2003), dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga.

Kerangka sampel blok sensus dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perkotaan adalah daftar seluruh blok sensus biasa yang terdapat di daerah perkotaan di setiap kabupaten/kota, sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perdesaan adalah daftar seluruh blok sensus biasa yang terdapat di daerah perdesaan di setiap kabupaten/kota.

Kerangka sampel untuk pemilihan sub-blok sensus adalah daftar sub-blok sensus dalam blok sensus terpilih yang mempunyai jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumahtangga.

Kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga yang terdapat dalam Daftar VSEN2006.L Blok IV, hasil pendaftaran rumah tangga di lapangan.

2.1.3 Rancangan Penarikan Sampel

Kor

Sampel **Kor** Susenas 2006 didesain untuk estimasi sampai tingkat kabupaten/kota. Rancangan sampel Susenas 2006 adalah rancangan sampel bertahap dua baik untuk daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan

dan daerah perdesaan dilakukan secara terpisah. Prosedur penarikan sampel Susenas 2006 untuk suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1 **Tahap pertama**, dari kerangka sampel blok sensus dipilih n_h blok sensus ($h = 1$, untuk perkotaan; $h = 2$, untuk perdesaan) secara *PPS* – sistematis dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil pencacahan P4B (April 2003). Pendaftaran rumah tangga/*listing* dilakukan pada setiap blok sensus terpilih.
- 2 **Tahap kedua**, memilih $\bar{m} = 16$ rumah tangga pada setiap blok sensus terpilih secara sistematis.

Untuk blok sensus yang muatannya lebih dari 150 rumah tangga, maka perlu dilakukan pemilihan satu sub blok sensus secara *PPS* – sistematis dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil pencacahan P4B.

Modul Sosial Budaya dan Pendidikan

Sampel modul ini merupakan subsampel dari sampel terpilih untuk estimasi data tingkat kabupaten/kota, baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Subsampel tersebut dipilih secara *Linear Systematic Sampling* dari daftar blok sensus terpilih di setiap kabupaten/kota baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan. Selanjutnya blok sensus terpilih (subsampel) tersebut disebut blok sensus kor-modul, karena di samping dicacah dengan kuesioner modul, juga dicacah dengan kuesioner kor. Dengan kata lain, blok sensus yang akan digunakan untuk estimasi di tingkat provinsi (blok sensus kor-modul) dipilih secara *Linear Systematic Sampling* dari daftar blok sensus terpilih di setiap kabupaten/kota (blok sensus kor). Blok sensus yang tidak terpilih kor-modul 2006 disebut blok sensus kor.

2.1.4 Metode Pengumpulan Data

Setiap rumah tangga yang terpilih dalam Susenas, dikunjungi oleh petugas pencacah yang diberikan tanggung jawab untuk mewawancarai responden untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara dilakukan langsung terhadap kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga (selain kepala rumah tangga) yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga yang bersangkutan.

Sebelum pelaksanaan lapangan untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu para petugas ini dilatih oleh instruktur (pelatih) tentang tata cara pengisian kuesioner dan pemakaian konsep/definisi yang digunakan dalam kegiatan survei. Hal ini dimaksud untuk mengurangi bias yang diakibatkan oleh salah satu faktor *non-sampling error*.

2.1.5 Petugas Lapangan

Dalam kegiatan survei-survei BPS yang berskala besar seperti Susenas, staf BPS Kabupaten/Kota atau Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dilibatkan sebagai pengawas (PMS), sedangkan yang menjadi petugas pencacah (PCL) adalah mitra statistik, yaitu petugas yang direkrut dari luar BPS. Seperti halnya untuk KSK, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi mitra statistik untuk dapat menjadi PCL dalam kegiatan survei minimal adalah tamat SLTA dan dinyatakan lulus dalam pelatihan petugas PCL.

2.2. Konsep dan Definisi

2.2.1. Tipe Daerah

Untuk menentukan apakah suatu desa/kelurahan tertentu termasuk daerah perkotaan atau perdesaan digunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses fasilitas umum. Penentuan skor suatu desa/kelurahan adalah seperti pada Tabel A. Kolom (1) menunjukkan variabel/klasifikasi yang digunakan, dan Kolom (2) menunjukkan nilai skor untuk setiap variabel.

Tabel A. Variabel, Klasifikasi, Skor & Kriteria Desa 2000

Variabel/Klasifikasi	Skor	Variabel/Klasifikasi	Skor
(1)	(2)	(1)	(2)
Total Skor			
● Skor Minimum	2		
● Skor Maksimum	26		
1. Kepadatan Penduduk/Km ²			
< 500	1		
500 - 1 249	2		
1 250 - 2 499	3		
2 500 - 3 999	4		
4 000 - 5 999	5		
6 000 - 7 499	6		
7 500 - 8 499	7		
8 500 +	8		
2. Persentase Rumah Tangga Pertanian			
70,00 +	1		
50,00 – 69,99	2		
30,00 – 49,99	3		
20,00 – 29,99	4		
15,00 – 19,99	5		
10,00 – 14,99	6		
5,00 – 9,99	7		
< 5,00	8		
3. Akses Fasilitas Umum	0,1,2,.....10		
A) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)			
● Ada atau ≤ 2,5 Km	1		
● > 2,5 Km	0		
B) Sekolah Menengah Pertama			
● Ada atau ≤ 2,5 Km	1		
● > 2,5 Km	0		
C) Sekolah Menengah Umum			
● Ada atau ≤ 2,5 Km	1		
● > 2,5 Km	0		
D) Pasar			
● Ada atau ≤ 2 Km	1		
● > 2 Km	0		
E) Bioskop			
● Ada atau ≤ 5 Km	1		
● > 5 Km	0		
F) Pertokoan			
● Ada atau ≤ 2 Km	1		
● > 2 Km	0		
G) Rumah Sakit			
● Ada atau ≤ 5 Km	1		
● > 5 Km	0		
H) Hotel/Bilyard/Diskotek/Panti pijat/Salon			
● Ada	1		
● Tidak ada	0		
I) Persentase Rumah Tangga Telepon			
● ≥ 8,00	1		
● < 8,00	0		
J) Persentase Rumah Tangga Listrik			
● ≥ 90,00	1		
● < 90,00	0		

Cara perhitungan skor adalah sebagai berikut:

- a. Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-8, satu bagi desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km², dua bagi desa dengan kepadatan kurang dari

- 500 – 1 249 orang per km² dan seterusnya sampai dengan 8 bagi desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8 500 orang per km².
- b. Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar 1 – 8, satu bila desa memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga tani, dua bila 50 – 69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan 8, bila desa mempunyai 5 persen atau kurang
 - c. Variabel akses fasilitas umum merupakan kombinasi antara keberadaan dan akses untuk mencapai fasilitas perkotaan
 - d. Skor untuk akses fasilitas umum adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan tetapi jaraknya relatif dekat dengan fasilitas perkotaan dan atau mudah mencapainya, maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1, dengan pertimbangan mudahnya akses kepada perkotaan tersebut serupa dengan memiliki.
 - e. Jumlah skor dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Desa dengan skor gabungan 9 atau kurang digolongkan sebagai desa perdesaan, sedangkan desa dengan skor gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan.

Dalam pelaksanaannya penentuan apakah suatu desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau perdesaan dilakukan oleh BPS Pusat dengan menggunakan hasil pendataan Potensi Desa (PODES) Sensus Penduduk 2000.

2.2.2. Blok Sensus

Blok sensus adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS. Sesuai dengan rancangan sampel, blok sensus terpilih Susenas 2006 sudah ditentukan oleh BPS pusat segera setelah rancangan sampel selesai. Setiap blok sensus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Seluruh blok sensus dalam setiap desa/kelurahan membagi habis wilayah desa/kelurahan bersangkutan.
2. Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat (SLS seperti: RT, RW, dusun, lingkungan dsb) diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan).

3. Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.

Ada 3 jenis blok sensus yaitu:

Blok sensus biasa (B) adalah blok sensus yang muatannya antara 80 sampai 120 rumah tangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.

Blok sensus khusus (K) adalah blok sensus yang mempunyai muatan sekurang-kurangnya 100 orang, kecuali lembaga pemasyarakatan yang muatannya tidak dibatasi. Tempat-tempat yang bisa dijadikan blok sensus khusus, antara lain:

- Asrama militer (tangsia)
- Daerah perumahan militer dengan pintu keluar masuk yang dijaga

Blok sensus persiapan (P) adalah blok sensus yang kosong seperti sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur) atau bekas permukiman yang terbakar.

Blok sensus khusus dan blok sensus persiapan bukan merupakan bagian dari kerangka sampel Susenas

2.2.3. Rumah tangga dan Anggota Rumah Tangga

Penduduk Lanjut Usia adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap **dianggap** sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Kawin adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

Cerai hidup adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.

Cerai mati adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lama hidup yang dicapai oleh sekelompok penduduk, mulai lahir sampai meninggal.

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang.

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Belum tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

Dapat Membaca dan Menulis adalah dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

Buta Huruf adalah tidak dapat membaca surat atau kalimat sederhana dengan suatu huruf, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.

Sakit adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktifitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.

Kondisi kesehatan adalah keadaan kesehatan responden saat ini termasuk keadaan fisik ataupun mental.

Angkatan Kerja Lansia adalah penduduk 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

Bukan Angkatan Kerja Lansia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi). Termasuk pula yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai alasan seperti cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

Pengangguran adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak bekerja dan mencari pekerjaan.

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebaskan tugas dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat izin usaha, dsb.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\text{persen}$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas. Namun untuk publikasi ini umur terbatas 60 tahun ke atas.

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.

Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan.

Jam Kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja terhadap angkatan kerja.

Mendengarkan radio adalah kegiatan seseorang mengarahkan pendengarannya pada materi yang disiarkan radio atau meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran radio sehingga ia dapat mengikuti, mengerti atau menikmatinya, baik radio milik sendiri maupun orang lain. Mendengarkan musik, lagu-lagu atau cerita dari tape recorder tidak dikategorikan mendengarkan radio.

Menonton Televisi (TV) adalah kegiatan seseorang mengarahkan perhatian pada tayangan TV atau meluangkan waktu untuk menonton tayangan TV sehingga ia dapat mengerti atau menikmati acara yang ditayangkan. Orang tuli yang dapat menikmati/mengerti acara TV yang ditonton, dikategorikan sebagai menonton TV.

Membaca adalah kegiatan seseorang selama seminggu yang lalu setidaknya-tidaknya pernah membaca satu topik dan mengetahui/mengerti isi dari topik tersebut.

Menonton Pertunjukan Kesenian adalah kegiatan seseorang dengan sengaja meluangkan waktu untuk menonton dan menikmati pertunjukan yang bersifat seni, sehingga ia dapat menikmati hasil seni tersebut. Pertunjukan dibatasi di tempat khusus yang dipersiapkan. Contoh : seni tari, seni musik, seni drama, seni wayang, dsb.

Menonton Pameran Seni Rupa/Kerajinan adalah kegiatan seseorang dengan sengaja meluangkan waktu untuk menonton atau menikmati pameran seni rupa/kerajinan, sehingga ia dapat menikmati hasil seni rupa/kerajinan tersebut. Contoh : seni lukis, seni patung, seni kerajinan sulaman, dsb.

Organisasi Kemasyarakatan/Sosial adalah organisasi yang melaksanakan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial baik untuk anggotanya sendiri maupun masyarakat (selain organisasi politik), dan telah mempunyai struktur yang tetap (susunan pengurus, seperti ketua, sekretaris dan bendahara), baik yang berbadan hukum maupun tidak, dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Lansia Terlantar :

Lansia yang berpotensi terlantar antara lain disebabkan mereka tidak mempunyai keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya atau tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan minimumnya, baik jasmani, rohani maupun sosial (PP Nomor 13 Tahun 1998).

Kriteria yang dipilih untuk menentukan derajat keterlantaran lansia adalah sebagai berikut :

1. Tidak/belum pernah sekolah atau tidak tamat SD
2. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu
3. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani) : nabati < 4 kali atau hewani < 2 kali atau kombinasinya dalam satu minggu
4. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel
5. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur
6. Bila sakit tidak diobati
7. Bekerja > 35 jam selama seminggu.

Kategori terlantar :

1. Terlantar, apabila memenuhi 3 kriteria atau lebih
2. Hampir terlantar, apabila memenuhi 2 kriteria
3. Tidak terlantar, apabila memenuhi maksimal 1 kriteria.

Makanan pokok adalah makanan padat yang dapat memberi energi pada seseorang. Makanan pokok ada beberapa jenis tergantung daerah/wilayah tempat tinggal, misalnya nasi, sagu, singkong, jagung dan ubi jalar. Yang dimaksud **makan** adalah makan dalam rangka makan pagi/sarapan, makan siang dan makan malam (tidak termasuk makanan jajanan).

Lauk pauk berprotein tinggi terbagi menjadi dua yaitu makanan yang mengandung protein hewani seperti ikan telur, daging dan makanan yang mengandung protein nabati seperti tahu, tempe dan kacang-kacangan.

Pakaian yang dimiliki (stel) adalah “pakaian luar” yaitu pakaian yang “utuh” (tidak compang-camping atau terlalu banyak tambalannya) yang dapat/lazim/pantas dipakai dalam pergaulan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan **1 stel/pasang pakaian** adalah 1 pakaian atas dan 1 pakaian bawah atau 1 pakaian terusan (termasuk pakaian seragam).

Pakaian atas, misalnya kemeja, blus, kaos T-shirt, kebaya dll.

Pakaian bawah, misalnya celana, rok, kain panjang dan sarung.

Pakaian terusan, misalnya gaun, gaun panjang (*longdress*).

Tempat tetap untuk tidur adalah tempat/ruangan/kamar tetap yang digunakan oleh responden untuk tidur tanpa memperhatikan dari tempat/ruangan/kamar tersebut.

2.3. Keterbatasan Data

Disadari ada keterbatasan data yang digunakan dalam penyajian publikasi ini. Penjelasan berikut diharapkan dapat lebih memperjelas dan mempermudah bagi pengguna dan pembaca publikasi ini dalam menafsirkan data yang disajikan.

- a. Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Lansia yang tinggal di panti jompo tidak dicakup.
- b. Sehubungan terjadinya gempa di Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta, maka pelaksanaan lapangan Susenas 2006 tidak termasuk Kabupaten Bantul. Data yang disajikan oleh Provinsi DI. Yogyakarta diwakili oleh beberapa Kabupaten/Kota namun tidak termasuk Kabupaten Bantul.

2.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah provinsi. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai kecenderungan perkembangan kegiatan sosial budaya lansia selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi pula dengan tabel lampiran untuk melihat data pada tingkat provinsi.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



Struktur Demografis Penduduk Lansia

Data kependudukan merupakan salah satu komponen utama yang selalu digunakan dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan khususnya kegiatan perencanaan input dan output pembangunan serta penetapan prioritas pembangunan. Data dasar mengenai kependudukan yang banyak digunakan terutama adalah data yang berkaitan dengan jumlah dan struktur penduduk. Data jumlah dan struktur penduduk pada kegiatan perencanaan input pembangunan digunakan sebagai rujukan untuk memperkirakan jumlah SDM atau tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan pembangunan, sedangkan pada kegiatan perencanaan output pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk digunakan untuk menentukan kelompok-kelompok sasaran (*target groups*) pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah, penduduk miskin dan lansia.

Pada kegiatan perencanaan pembangunan, salah satu jenis data dasar kependudukan yang sangat penting artinya adalah data mengenai struktur demografis penduduk atau biasa dikenal dengan komposisi penduduk menurut karakteristik demografis. Sebagai contoh adalah data komposisi penduduk menurut umur/kelompok umur yang antara lain dapat digunakan untuk menentukan kelompok-kelompok sasaran pembangunan yang ditetapkan berdasarkan umur. Misalnya, penduduk usia 0 – 4 tahun atau anak balita merupakan kelompok sasaran untuk program imunisasi yang merupakan salah satu program pembangunan di bidang kesehatan. Pada penduduk usia sekolah yang mencakup penduduk usia 7–12, 13 – 15 dan 16 – 18 tahun merupakan kelompok sasaran untuk pembangunan bidang pendidikan.

Kegiatan perumusan arah dan kebijakan pembangunan dalam kegiatan program pembangunan salah satunya ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lansia. Untuk itu dibutuhkan tersedianya data atau informasi dasar yang berkaitan dengan jumlah dan struktur demografis penduduk lansia. Tersedianya data dasar tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan sasaran/target pembangunan. Sejalan dengan itu, analisis pada bagian ini difokuskan untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai jumlah dan komposisi penduduk lansia menurut beberapa karakteristik demografis antara lain umur, jenis kelamin, daerah tempat tinggal dan struktur dalam rumah tangga serta perkembangannya.

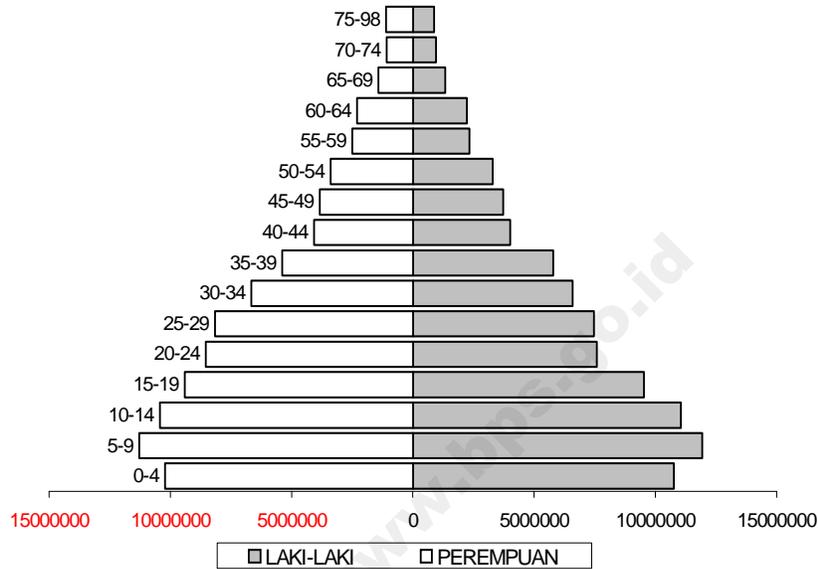
3.1. Perkembangan Struktur Penduduk Indonesia

Teori Malthus tentang transisi demografi menyebutkan bahwa awal transisi terjadi saat mortalitas turun lebih cepat dari turunnya tingkat fertilitas, sehingga struktur umur penduduk mengarah pada 'penduduk muda' dengan piramida penduduk yang mempunyai alas yang relatif lebar. Pada tahap selanjutnya dimana fertilitas turun pada tingkat yang cukup berarti, maka struktur umur penduduk berubah arah, yaitu menjadi 'penduduk tua' dengan alas piramida yang makin menyempit atau relatif sama dengan batang-batang piramida yang di atasnya.

Perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari struktur umurnya (piramida penduduk 1990-1995-2006) berkembang dari struktur 'penduduk muda' ke arah struktur

'penduduk tua' seperti yang ditunjukkan oleh Teori Malthus. Kondisi ini seiring dengan jumlah penduduk Indonesia yang dari tahun ke tahun terus meningkat sekitar 3 s.d 4 juta jiwa pertahun meskipun laju pertumbuhan penduduknya dapat dikendalikan.

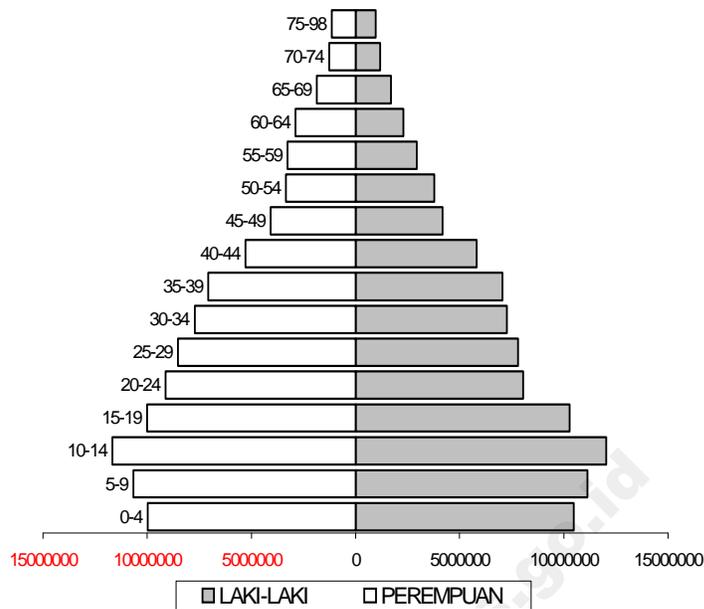
Gambar 3.1.
Piramida Penduduk Tahun 1990



Sumber: BPS - Sensus Penduduk 1990

Gambar 3.1. menunjukkan piramida penduduk Indonesia menurut struktur umur tahun 1990. Gambar tersebut menunjukkan bahwa memasuki dekade 1990, penduduk Indonesia mulai melewati masa awal transisi demografis. Hal ini tercermin dari alas kaki piramida yang meskipun masih cukup lebar namun mulai mengalami penyempitan dan lebih pendek atau relatif sama dengan batang-batang piramida yang terletak di atasnya. Secara umum kondisi ini terjadi untuk semua penduduk, baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.

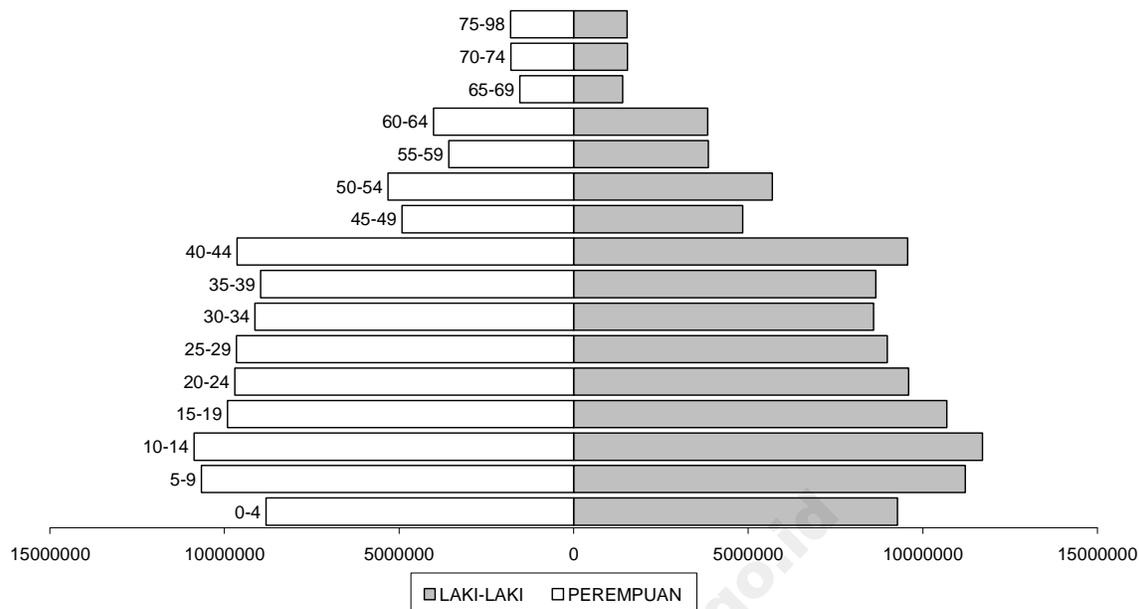
Gambar 3.2.
Piramida Penduduk Tahun 1995



Sumber: BPS - Survei Penduduk Antar Sensus 1995

Pergeseran struktur penduduk dari penduduk muda ke penduduk tua yang merupakan tahap kedua dari proses transisi demografis penduduk Indonesia mulai terlihat nyata selama periode tahun 1990–1995. Piramida penduduk Indonesia pada tahun 1995 (lihat pada Gambar 3.2) nampak berbeda dengan piramida penduduk pada tahun 1990 (lihat Gambar 3.1). Pada piramida penduduk tahun 1995 terlihat bahwa batang-batang piramida untuk kelompok umur yang lebih muda nampak makin menyempit, sebaliknya untuk kelompok umur yang lebih tua nampak makin melebar.

Gambar 3.3.
Piramida Penduduk Tahun 2006



Sumber: BPS - Susenas 2006

Gambar 3.3 menyajikan piramida penduduk Indonesia pada tahun 2006 dimana batang-batang piramida di bagian bawah piramida untuk kelompok umur muda secara umum telah menyempit. Sebaliknya, batang-batang piramida di bagian atas piramida untuk kelompok umur tua secara umum makin melebar. Gambaran perkembangan struktur penduduk Indonesia selama periode tahun 1990 – 2006 ini menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Indonesia sudah mengarah pada era "penduduk berstruktur tua" (*aging population*), yaitu suatu negara dengan proporsi penduduk lansia yang telah mencapai sebesar 7 persen atau lebih, kondisi ini sejalan dengan pernyataan Suyono (ibid, 1999) dan Suwoko (2004).

3.2. Rasio Ketergantungan Penduduk Tua

Rasio ketergantungan penduduk tua (*old dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk tua pada penduduk usia produktif. Angka tersebut merupakan perbandingan antara jumlah penduduk tua (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk produktif (15-59 tahun). Dari angka ini tercermin besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk tua.

Pada Tabel 3.a disajikan angka rasio ketergantungan penduduk tua dalam kurun waktu 1990-2006. Selama kurun waktu tersebut, terjadi peningkatan rasio ketergantungan penduduk tua terhadap penduduk usia produktif baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Angka rasio ketergantungan penduduk tua meningkat dari sebesar 11,03 pada tahun 1990 menjadi sebesar 11,51 pada tahun 2000 dan meningkat lagi pada tahun 2006 menjadi sebesar 12,37. Angka rasio sebesar 12,37 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 12 orang penduduk lansia. Peningkatan angka rasio ketergantungan penduduk tua tersebut mencerminkan semakin tingginya angka rata-rata harapan hidup penduduk Indonesia yang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah penduduk tua.

Tabel 3.a. Angka Rasio Ketergantungan Penduduk Tua menurut Tipe Daerah Tahun 1990, 1995, 2000 dan 2006

Tipe Daerah	Rasio Ketergantungan			
	1990	1995	2000	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	8,63	9,10	9,40	10,52
Perdesaan	12,22	13,01	13,21	13,90
Perkotaan +Perdesaan	11,03	11,51	11,51	12,37

Sumber: BPS - SP 1990 dan 2000, SUPAS 1995, Susenas 2006

Tabel 3.a juga menunjukkan bahwa angka rasio penduduk tua di daerah perkotaan cenderung lebih rendah daripada penduduk tua di daerah perdesaan. Pada tahun 2006, angka rasio penduduk tua di perkotaan tercatat sebesar 10,52, sementara di daerah perdesaan mencapai sebesar 13,90.

3.3. Distribusi dan Komposisi Penduduk Lanjut Usia

Hasil Susenas 2006 menunjukkan bahwa penduduk lansia Indonesia telah mencapai 17,5 juta orang atau sekitar 7,90 persen dari seluruh penduduk Indonesia, seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.b. Proporsi penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 6,96 persen dari keseluruhan penduduk perkotaan, sedangkan proporsi

mereka yang tinggal di daerah perdesaan terlihat lebih besar yaitu 8,62 persen dari keseluruhan penduduk perdesaan.

Bila dilihat menurut jenis kelamin, proporsi penduduk lansia perempuan nampak lebih besar dibandingkan proporsi penduduk lansia laki-laki. Dari seluruh penduduk laki-laki 7,50 persen diantaranya adalah lansia laki-laki dan dari seluruh penduduk perempuan 8,30 persen diantaranya adalah lansia perempuan. Kontribusi penduduk perempuan dalam populasi penduduk lansia yang lebih tinggi dari penduduk laki-laki hal ini didukung oleh kenyataan bahwa penduduk perempuan mempunyai angka harapan hidup yang lebih lama dari penduduk laki-laki.

Tabel 3.b. Jumlah dan Proporsi Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2006

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Tipe Daerah		
Perkotaan	6 707 019	6,96
Perdesaan	10 771 263	8,62
Perkotaan + Perdesaan	17 478 282	7,90
Jenis Kelamin		
Laki-laki	8 319 990	7,50
Perempuan	9 158 292	8,30
Laki-laki + Perempuan	17 478 282	7,90

Sumber: BPS - Susenas 2006

Proporsi penduduk lansia sangat bervariasi antar wilayah provinsi di Indonesia, seperti yang terlihat pada Tabel Lampiran 3.1.3. Pada Tabel tersebut nampak bahwa proporsi penduduk lansia berkisar antara 1,74 persen s.d 14,16 persen. Provinsi yang mempunyai penduduk lansia dengan proporsi paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya berturut-turut adalah Provinsi DI Yogyakarta (14,16 persen), Jawa Timur (10,53 persen) dan Jawa Tengah (10,47 persen). Sementara provinsi yang proporsi penduduk lansianya paling rendah adalah Provinsi Papua (1,74 persen), Irian Jaya Barat (3,12 persen) dan Kepulauan Riau (3,78 persen). Pola yang sama terjadi pada penduduk lansia laki-laki maupun perempuan.

Tabel 3.c menyajikan distribusi penduduk lansia menurut status perkawinan. Dari tabel tersebut nampak bahwa penduduk lansia pada umumnya berstatus kawin (61,39 persen). Sisanya adalah mereka yang berstatus cerai mati (35,65 persen), cerai hidup (2,15 persen) dan belum kawin (0,81 persen). Pola perkawinan lansia secara keseluruhan berlaku pula di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 3.c. Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, Tahun 2006

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki	0,63	85,31	1,12	12,94	100,00
Perempuan	1,18	38,60	3,18	57,04	100,00
L+P	0,92	60,84	2,20	36,04	100,00
Perdesaan (D)					
Laki-laki	0,54	85,57	1,06	12,83	100,00
Perempuan	0,93	40,08	3,08	55,92	100,00
L+P	0,74	61,73	2,12	35,41	100,00
K + D					
Laki-laki	0,58	85,47	1,08	12,87	100,00
Perempuan	1,03	39,51	3,12	56,35	100,00
L+P	0,81	61,39	2,15	35,65	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2006

Struktur perkawinan penduduk lansia di setiap provinsi menunjukkan pola yang sama dengan struktur perkawinan penduduk lansia secara nasional. Keadaan ini dapat dilihat pada Tabel Lampiran 3.3, kecuali untuk Provinsi D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku. Ketujuh provinsi tersebut, persentase penduduk lansia yang berstatus belum kawin cenderung lebih tinggi dari mereka yang berstatus cerai hidup.

Bila dilihat dari sisi gender, nampak bahwa pola status perkawinan penduduk lansia laki-laki berbeda dengan penduduk lansia perempuan. Seperti yang terlihat pada Tabel 3.c, penduduk lansia laki-laki lebih banyak yang berstatus kawin (85,47 persen) dibandingkan yang berstatus cerai mati (12,87 persen). Sebaliknya, penduduk lansia

perempuan lebih banyak yang berstatus cerai mati (56,35 persen) daripada yang berstatus kawin (39,51 persen). Pola status perkawinan yang berbeda antara penduduk lansia menurut gender ini juga terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Terdapat fenomena yang menarik pada status perkawinan untuk lansia. Pada status perkawinan cerai terdapat perbedaan persentase yang cukup tinggi antara lansia perempuan dengan lansia laki-laki. Tingginya persentase lansia perempuan yang berstatus cerai dapat disebabkan karena sebagian besar kaum perempuan yang telah bercerai tidak segera kawin lagi untuk jangka waktu yang relatif lama. Sebaliknya, penduduk lansia laki-laki yang terpaksa bercerai karena ditinggal mati oleh pasangannya, umumnya segera kawin lagi. Kondisi ini mengakibatkan persentase penduduk lansia laki-laki yang berstatus cerai mati sangat kecil, sebaliknya proporsi mereka yang berstatus kawin cenderung tinggi.

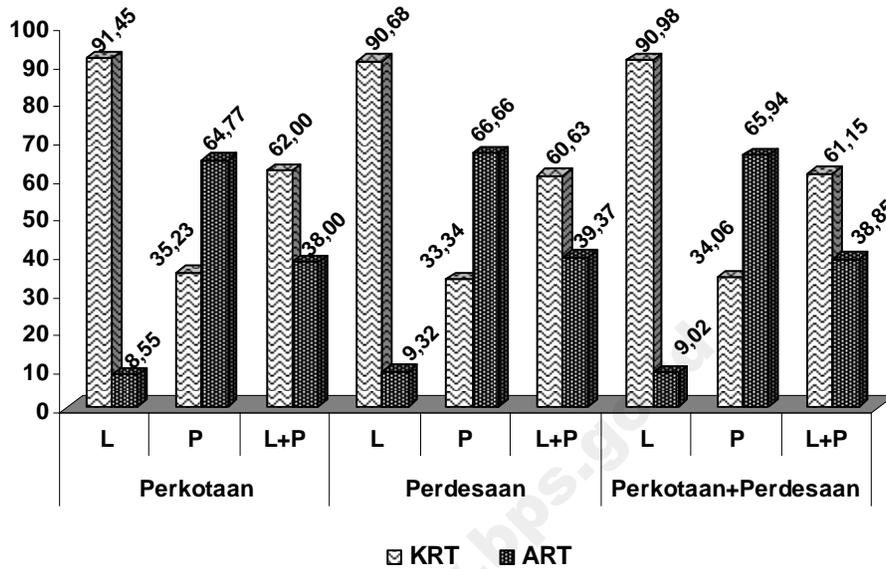
3.4. Peranan Penduduk Lansia di dalam Rumah Tangga

Peran kepala rumahtangga sangat penting dalam menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga. Selain harus bertanggung-jawab secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, kepala rumah tangga juga harus mampu mengatur dan memimpin anggota rumah tangganya, serta berperan aktif sebagai pengambil keputusan.

Gambar 3.4 menyajikan peran keanggotaan penduduk lansia dalam rumah tangga. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa secara umum mayoritas (61,15 persen) penduduk lansia masih memegang peranan penting di dalam lingkungan rumah tangga atau sebagai kepala rumah tangga, sedangkan penduduk lansia yang berperan sebagai anggota rumah tangga hanya sebesar 38,85 persen. Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk lansia yang menjadi kepala rumah tangga di daerah perkotaan mencapai 62,00 persen, tidak berbeda jauh dengan yang berada di daerah perdesaan yaitu sebesar 60,63 persen. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena lansia sebagai kepala rumah tangga dituntut beban dan tanggung jawab tinggi secara ekonomi untuk anggota rumah tangga. Hal ini didukung pula oleh tingginya lansia bekerja dengan jam kerja penuh (lebih dari 35 jam per minggu). Di sisi lain, lansia juga perlu menikmati masa lansianya. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998

tentang kesejahteraan lansia perlu disosialisasikan terutama kepada penduduk usia produktif.

Gambar 3.4.
Persentase Penduduk Lansia menurut Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2006



Sumber: BPS - Susenas 2006

Peran keanggotaan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara penduduk lansia laki-laki dan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.4, terlihat bahwa persentase penduduk lansia laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga mencapai lebih dari 90,98 persen, sedangkan penduduk lansia perempuan hanya sebesar 34,06 persen. Keadaan yang sama dapat dilihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Persentase penduduk lansia laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga di daerah perkotaan sebesar 91,45 persen, sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan lansia di daerah perdesaan yaitu sebesar 90,68 persen. Sementara itu, penduduk lansia perempuan di daerah perkotaan yang menjadi kepala rumah tangga hanya sebesar 35,23 persen dan di daerah perdesaan 33,34 persen.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



Pendidikan Penduduk Lansia

Tingkat kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan (RPJP 2005-2025).

Sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan selain merupakan sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan, juga merupakan sarana untuk membentuk watak dan peradaban yang sesuai dengan bangsa yang bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa output/keluaran yang merupakan hasil proses pembelajaran lembaga pendidikan adalah sumber daya manusia (SDM) yang terampil, berilmu, handal, kreatif dan berakhlak mulia.

Pembangunan di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Baik usia muda maupun tua mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Pendidikan bagi penduduk yang berusia lanjut juga dibutuhkan agar timbul rasa kemandirian sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat.

Berkaitan dengan pendidikan penduduk lansia, pemerintah telah berupaya menyelenggarakan berbagai program yang ditujukan dalam meningkatkan pendidikan sekaligus kesejahteraan penduduk lansia, antara lain program Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan dasar) dan dilanjutkan dengan program keaksaraan (keaksaraan fungsional). Keseluruhan program yang diselenggarakan pemerintah tersebut pada dasarnya mencerminkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan bangsa.

Penduduk lansia mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya, seperti balita, remaja dan pemuda. Jika kelompok penduduk lainnya seperti balita, remaja dan pemuda memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang makin berkembang dan meningkat, sebaliknya penduduk lansia memiliki kemampuan fisik dan non fisik yang semakin menurun karena proses menua yang terjadi pada mereka secara alamiah. Sejalan dengan itu, program pembangunan pendidikan serta pengembangan dan peningkatan ketrampilan bagi penduduk lansia memerlukan penanganan yang lebih khusus dan terfokus.

4.1. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan seseorang mencerminkan tinggi rendahnya kualitas dari orang tersebut. Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan dimasa kemerdekaan tercermin dari profil tingkat pendidikan lansia yang secara umum masih sangat rendah, hal ini memperlihatkan masih rendahnya kualitas SDM lansia. Rendahnya pendidikan penduduk lansia tercermin dari masih tingginya persentase penduduk lansia yang berpendidikan hanya sampai SD, seperti yang terlihat pada Tabel 4.a. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa penduduk lansia yang berhasil menamatkan pendidikan SD sekitar 21,27 persen, bahkan banyak yang tidak menamatkan SD dan yang tidak/belum pernah sekolah yaitu masing-masing 30,77 persen dan 35,53 persen. Di sisi lain, penduduk lansia

yang menamatkan pendidikan SLTP ke atas kurang dari 5 persen. Bila dibandingkan tahun 2005, proporsi penduduk lansia dengan pendidikan rendah (di bawah SD) persentasenya mengalami penurunan (68,78 persen berbanding 66,30 persen). Meskipun angkanya masih terlihat tinggi, namun menunjukkan kemajuan yang cukup baik.

Tingkat pendidikan lansia yang secara umum masih relatif rendah, hampir terdapat di semua provinsi. Pada Tabel Lampiran 4.3.3. dapat dilihat bahwa lebih dari 35 persen diantaranya tidak/belum pernah sekolah dan 30 persen lagi pernah sekolah tetapi tidak tamat SD. Persentase tertinggi lansia yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (61,69 persen), D.I. Yogyakarta (51,02 persen) dan Sulawesi Selatan (48,90 persen). Sebaliknya persentase penduduk lansia terendah yang tidak/belum pernah sekolah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara (2,39 persen), Gorontalo (8,45 persen) dan DKI Jakarta (12,15 persen).

Tabel 4.a. Persentase Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2005 & 2006

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	2005			2006		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/belum pernah sekolah	24,62	51,21	38,53	22,96	46,94	35,53
Tidak tamat SD	33,27	27,49	30,25	32,26	29,42	30,77
SD	25,96	14,76	20,10	26,93	16,14	21,27
SLTP	6,50	3,30	4,83	6,72	3,50	5,03
SM	7,10	2,69	4,79	8,01	3,24	5,51
PT	2,55	0,54	1,50	3,12	0,76	1,88
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2005 dan 2006

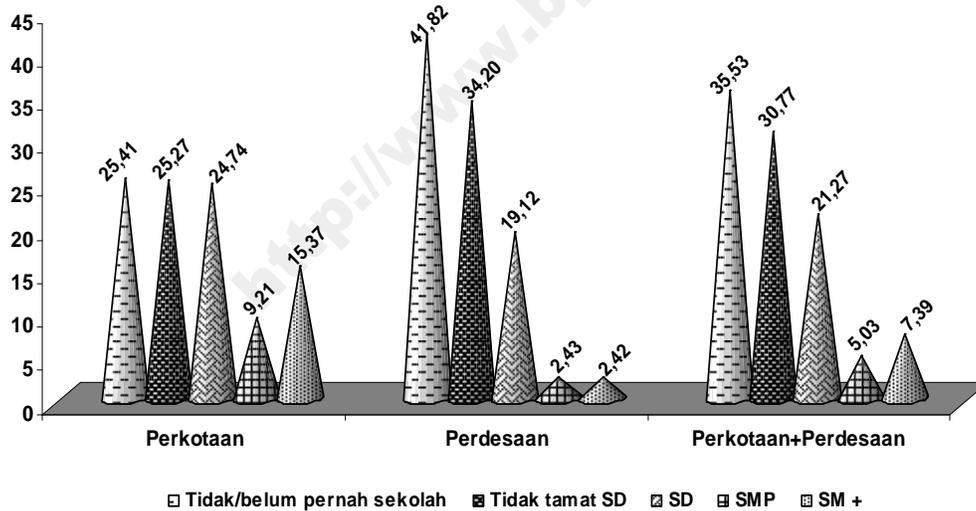
Perbedaan jenis kelamin juga menentukan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk lansia. Ini merupakan gambaran/pola pendidikan di masa Indonesia baru merdeka di tahun '45-an. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.a, persentase penduduk lansia laki-laki yang tidak pernah sekolah hanya sebesar 22,96 persen, sedangkan untuk penduduk lansia perempuan mencapai dua kali lipatnya yaitu sebesar 46,94 persen. Hal

ini mencerminkan bahwa pendidikan penduduk lansia laki-laki lebih baik dari penduduk lansia perempuan. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa kesenjangan terjadi pada semua jenjang pendidikan dengan selisih persentase yang cukup signifikan. Sebuah fenomena yang menarik dari indikasi terjadinya kesenjangan gender dalam akses memperoleh pelayanan pendidikan di masa lalu. Budaya patriarkhi masih kental di dunia pendidikan dalam keluarga, pendidikan lebih diutamakan pada laki-laki dibandingkan perempuan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk lansia baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mempunyai pola yang sama dengan nasional, yaitu masih tingginya persentase penduduk lansia pada jenjang pendidikan rendah dan angkanya terus menurun seiring dengan tingginya tingkat pendidikan yang ditamatkan, seperti yang disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1.

Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2006



Sumber: BPS - Susenas 2006

Dari gambar tersebut terlihat pula bahwa pendidikan penduduk lansia di daerah perkotaan cenderung lebih baik dari penduduk lansia yang tinggal di daerah perdesaan. Di daerah perkotaan, persentase penduduk lansia yang menamatkan jenjang pendidikan SD ke atas cenderung lebih tinggi dari penduduk lansia di daerah perdesaan. Sebaliknya, penduduk lansia yang tidak/belum pernah sekolah dan yang tidak tamat SD cenderung lebih tinggi

di daerah perdesaan (berturut-turut 41,82 persen dan 34,20 persen) dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan (berturut-turut 25,41 persen dan 25,27 persen).

Meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di masa kemerdekaan, di daerah perkotaan pada umumnya ketersediaan fasilitas pendidikan masih cukup memadai dibanding daerah perdesaan. Akses masyarakat perkotaan dalam memperoleh pelayanan pendidikan masih lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini diduga menjadi akar adanya kesenjangan pendidikan yang ditamatkan antara penduduk lansia di daerah perkotaan dan perdesaan.

4.2. Kemampuan membaca dan menulis

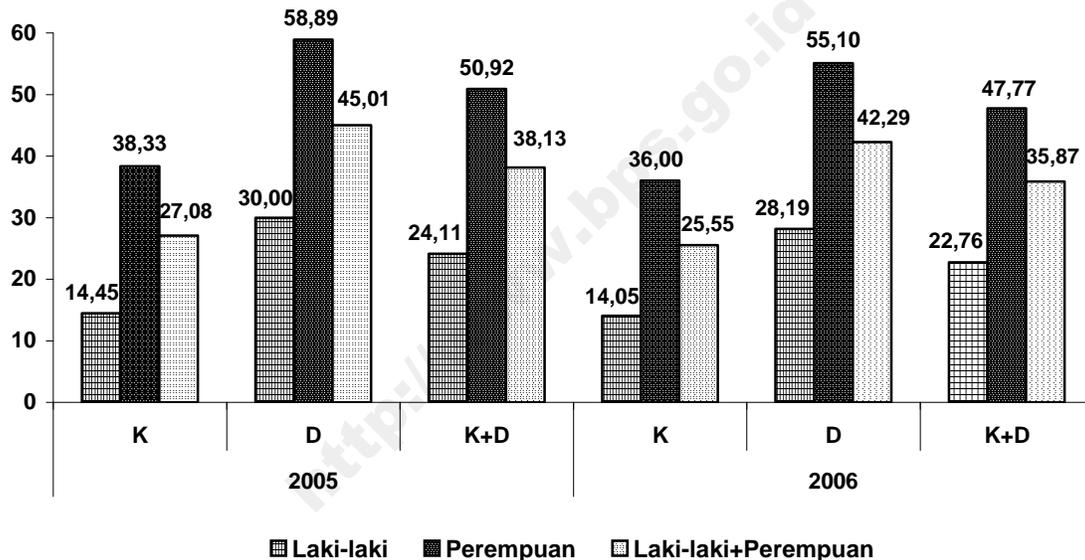
Kemampuan membaca dan menulis huruf latin serta berhitung sederhana merupakan kemampuan paling mendasar yang pertama kali diajarkan pada setiap siswa. Ketrampilan tersebut pada umumnya mulai diajarkan pada kelas awal jenjang pendidikan dasar atau Sekolah Dasar (SD). Penguasaan kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan berhitung sederhana merupakan persyaratan mutlak yang harus dikuasai oleh setiap orang dalam upaya mempelajari ketrampilan dan keahlian lainnya. Sebaliknya, seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin mencerminkan bahwa ia tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Sejalan dengan itu, angka buta huruf yang menunjukkan proporsi penduduk buta huruf terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan merupakan indikator dasar yang bisa digunakan untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat.

Tingkat buta huruf penduduk 15 tahun ke atas di Indonesia tahun 2006 masih tinggi (8,55 persen), sebagian besar merupakan penduduk usia 45 tahun ke atas termasuk di dalamnya penduduk lansia. Gambar 4.2. menyajikan persentase buta huruf penduduk lansia pada tahun 2005 dan 2006. Terjadi kemajuan/peningkatan kualitas penduduk lansia dalam hal kemampuan membaca dan menulis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan angka buta huruf penduduk lansia dari 38,13 persen pada tahun 2005 menjadi 35,87 persen pada tahun 2006. Bila dilihat menurut tipe daerah nampak bahwa angka buta huruf penduduk lansia di daerah perkotaan lebih rendah dari daerah perdesaan. Angka buta huruf penduduk lansia di daerah perkotaan tercatat sebesar 25,55 persen, sedangkan di daerah perdesaan mencapai 42,29 persen.

Dilihat dari angka buta huruf yang telah mencapai dua digit, kondisi ini sejalan dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih sangat rendah. Angka buta huruf penduduk lansia yang cukup tinggi ini dipengaruhi oleh kondisi bangsa Indonesia pada 60 tahun yang lalu. Pada saat itu bangsa Indonesia baru melepaskan diri dari belenggu penjajahan sehingga pembangunan infra struktur serta berbagai fasilitas termasuk fasilitas pendidikan pada masa itu dilakukan masih dalam skala yang sangat terbatas.

Gambar 4.2.

Persentase Penduduk Lansia yang Buta Huruf menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2005 dan 2006



Sumber: BPS - Susenas 2005 dan 2006

Pada Gambar 4.2. juga dapat dilihat angka buta huruf lansia menurut gender. Pada tahun 2006, persentase penduduk lansia perempuan yang buta huruf mencapai sebesar 47,77 persen atau dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki yaitu sebesar 22,76 persen. Kondisi ini juga terjadi pada tahun sebelumnya (tahun 2005) yaitu berturut-turut lansia perempuan 50,92 persen dan lansia laki-laki 24,11 persen. Berdasarkan data-data tersebut, telah terjadi kesenjangan yang cukup tinggi dalam hal kemampuan baca tulis antara penduduk lansia laki-laki dan perempuan. Salah satu alasan yang mempengaruhinya adalah karena adanya sistem budaya patriarkhi

masyarakat Indonesia saat itu yang cenderung lebih mengutamakan kaum laki-laki (lihat antara lain Iriantono et al, 2002).

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi angka buta huruf penduduk lansia adalah status ekonomi rumah tangga. Pada kelompok 40 persen rumah tangga yang berpendapatan terendah terdapat angka persentase penduduk lansia buta huruf yang paling tinggi yaitu sekitar 45,71 persen atau angka melek huruf yang terendah (54,29 persen), seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.b. Sebaliknya, mereka yang berada pada kelompok 20 persen rumah tangga berpendapatan paling tinggi mempunyai angka persentase penduduk lansia buta huruf yang paling rendah yaitu sebesar 21,99 persen atau angka melek huruf tertinggi (78,01 persen). Keadaan ini secara umum menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin meningkat status ekonomi rumah tangga maka persentase lansia yang melek huruf juga semakin tinggi, atau dapat dikatakan pula bahwa angka buta hurufnya semakin rendah.

Tabel 4.b. Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Status Ekonomi Rumah Tangga dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Tahun 2006

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Melek Huruf	Buta Huruf	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
40 persen bawah	62,02	37,98	100,00
40 persen menengah	77,87	22,13	100,00
20 persen atas	92,74	7,26	100,00
Perdesaan			
40 persen bawah	48,78	51,22	100,00
40 persen menengah	58,78	41,22	100,00
20 persen atas	69,74	30,26	100,00
Perkotaan+Perdesaan			
40 persen bawah	54,29	45,71	100,00
40 persen menengah	65,78	34,22	100,00
20 persen atas	78,01	21,99	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2006

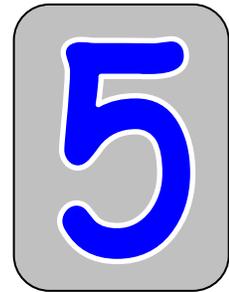
Pada Tabel 4.b. juga ditunjukkan bahwa fenomena keberadaan status ekonomi rumah tangga yang cenderung mempengaruhi tinggi rendahnya persentase penduduk lansia yang buta huruf, juga terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Angka

yang relatif lebih menyolok terutama terdapat di daerah perkotaan dimana pada kelompok 20 persen rumah tangga yang berpendapatan tertinggi hanya terdapat sekitar 7 persen penduduk lansia yang mengalami buta huruf, sedangkan mereka yang buta huruf pada kelompok 40 persen rumah tangga berpendapatan terendah persentasenya hampir 38 persen.

Tabel Lampiran 4.1.9 menunjukkan bahwa persentase lansia yang buta huruf antar provinsi sangat bervariasi antara 3,25 – 61,89 persen. Angka buta huruf lansia tertinggi secara berturut-turut ditemukan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (61,89 persen), Bali (52,60 persen) dan D.I. Yogyakarta (51,32 persen). Sebaliknya persentase lansia yang buta huruf terendah secara berturut-turut ditemukan di Provinsi Sulawesi Utara (3,25 persen), DKI Jakarta (11,11 persen) dan Maluku (12,16 persen).

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



Kesehatan Penduduk Lansia

Upaya untuk membangun kualitas SDM tetap menjadi perhatian penting dalam setiap program pembangunan pemerintah. SDM merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Salah satu cermin dari tingginya kualitas SDM suatu bangsa adalah meningkatnya derajat kesehatan penduduk. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi setiap manusia yang akan mempengaruhi kualitas kehidupannya. Seseorang yang mempunyai badan sehat akan dapat melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari dengan lebih baik dan optimal dibandingkan bila kesehatan sedang terganggu. Oleh karena itu, kesehatan merupakan harta yang tak ternilai yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Gambaran tersebut secara nyata dapat diperoleh dari potret kegiatan masyarakat sehari-hari. Berbagai program pemerintah senantiasa memperhatikan dan

memberikan prioritas pada bidang kesehatan. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi setiap penduduk, untuk mewujudkan peningkatan kesehatan secara optimal dan berkesinambungan sebagai salah satu unsur dari kesejahteraan.

Kondisi kesehatan seseorang berkaitan dengan kekuatan dan daya tahan tubuhnya. Semakin bertambah umur maka semakin menurun kekuatan dan daya tahan tubuh orang tersebut. Penurunan daya tahan tubuh hingga tingkat tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi rentan atau mudah terserang berbagai penyakit. Hal ini terutama dirasakan oleh orang yang berusia lanjut. Proses menua (*aging*) yang secara alamiah terjadi pada penduduk lansia secara bertahap akan mengakibatkan daya tahan tubuhnya menjadi semakin menurun dan rentan dari serangan berbagai penyakit. Sejalan dengan itu, aspek kesehatan bagi penduduk lansia sangat penting karena tanpa memiliki kesehatan yang prima maka para lansia akan kesulitan melanjutkan aktifitas kehidupannya.

Untuk dapat melangsungkan kehidupannya, penduduk lansia harus dapat menjaga pola hidup sehat. Namun, kondisi kesehatan penduduk lansia sekarang ini tidak saja hanya dipengaruhi pola kehidupan sekarang, namun juga sangat dipengaruhi oleh pola hidup semasa mudanya. Kondisi kesehatan seseorang pada saat sekarang ini merupakan hasil proses akumulasi yang terjadi semenjak berupa janin dalam rahim. Secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai pola hidup sehat dari masa kecil, remaja, dewasa hingga lansia, kondisi kesehatannya akan lebih baik dibandingkan dengan lansia yang masa lalunya tidak berperilaku hidup sehat.

Gambaran secara makro mengenai kondisi kesehatan penduduk lansia, dibahas pada bagian ini secara garis besar, gambaran mengenai derajat kesehatan penduduk lansia dilihat dari beberapa indikator kesehatan yang meliputi angka keluhan kesehatan, angka kesakitan, rata-rata lama sakit, dan cara berobat penduduk lansia.

5.1. Keluhan Kesehatan

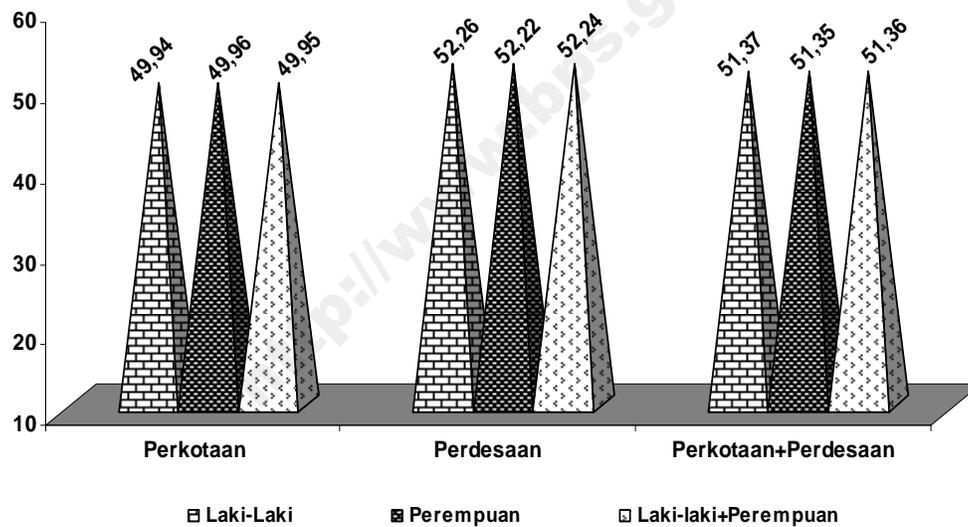
Keluhan kesehatan adalah seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau sebab lainnya.

Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, namun terjadinya keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh penduduk dapat menggambarkan tingkat/derajat kesehatan secara kasar.

Pada Gambar 5.1 ditunjukkan bahwa dari keseluruhan populasi penduduk lansia lebih dari separuhnya atau sebesar 51,36 persen mengalami keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu. Keluhan kesehatan ini dialami baik oleh penduduk lansia laki-laki maupun perempuan dan persentase keduanya relatif sama yaitu berturut-turut 51,37 persen dan 51,35 persen. Kondisi yang sama juga terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Gambar 5.1.

Persentase Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2006



Sumber: BPS – Susenas 2006

Banyaknya penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan (sekitar separuh dari populasi lansia) ditemukan hampir di semua provinsi dengan persentase yang bervariasi antara 40,53 – 65,40 persen (lihat Tabel Lampiran 5.1). Tiga provinsi dengan persentase penduduk lansia yang mengalami keluhan kesehatan paling tinggi berturut-turut adalah Provinsi Gorontalo (65,40 persen), Nanggroe Aceh Darussalam (63,34 persen) dan Nusa Tenggara Barat (62,96 persen). Sebaliknya, persentase penduduk lansia

yang mengalami keluhan kesehatan terkecil secara berturut-turut ditemukan di Provinsi Irian Jaya Barat (40,53 persen), Banten (44,15 persen) dan Sumatera Selatan (45,11 persen).

Pola hidup yang dijalani seseorang dari usia balita hingga lansia mempengaruhi kondisi fisik dan daya tahan tubuh. Pola hidup yang kurang sehat membawa akibat pada penurunan daya tahan tubuh sehingga akan timbul berbagai keluhan kesehatan terutama pada masa tua. Keluhan kesehatan yang dialami penduduk lansia bermacam-macam, seperti yang disajikan pada Tabel 5.a. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dialami oleh para lansia berturut-turut adalah batuk dengan persentase sebesar 46,58 persen, pilek sebesar 30,23 persen, panas sebesar 21,30 persen dan sakit gigi 4,16 persen. Pola yang sama terjadi pada penduduk lansia, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan dengan persentase keduanya tidak jauh berbeda dengan nasional.

Tabel 5.a. Proporsi Penduduk Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Keluhan, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2006

Jenis Keluhan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki			
Panas	19,86	22,17	21,31
Batuk	46,67	50,76	49,23
Pilek	30,37	30,63	30,53
Sakit gigi	4,57	4,74	4,68
Perempuan			
Panas	19,31	22,49	21,30
Batuk	40,54	46,34	44,17
Pilek	28,36	30,90	29,95
Sakit gigi	3,69	3,69	3,69
Laki-laki+Perempuan			
Panas	19,57	22,34	21,30
Batuk	43,46	48,44	46,58
Pilek	29,32	30,77	30,23
Sakit gigi	4,11	4,19	4,16

Sumber: BPS – Susenas 2006

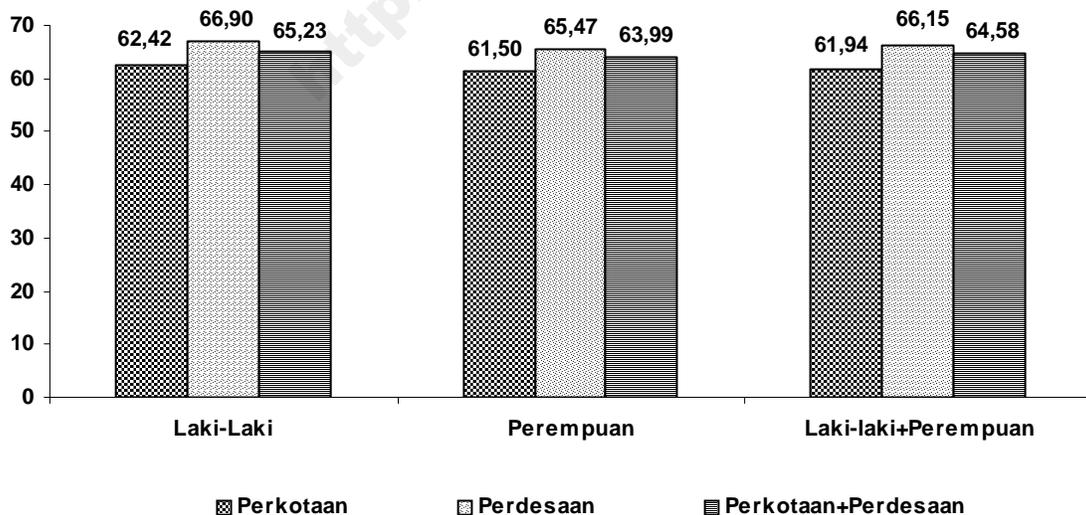
5.2. Angka Kesakitan

Keluhan kesehatan yang dialami penduduk lansia dapat mengakibatkan aktifitas sehari-harinya menjadi terganggu. Angka kesakitan (*morbidity rates*) lansia adalah proporsi penduduk lansia yang mengalami masalah kesehatan hingga mengganggu aktifitas sehari-hari selama satu bulan terakhir. Angka kesakitan ini merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Angka kesakitan tergolong sebagai indikator kesehatan negatif. Semakin tinggi angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.

Gambar 5.2 menyajikan angka kesakitan lansia menurut jenis kelamin dan tipe daerah. Angka kesakitan lansia pada tahun 2006 relatif cukup tinggi yaitu mencapai sebesar 64,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang lansia terdapat sekitar 65 orang di antaranya mengalami sakit. Daya tahan tubuh yang menurun merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya penduduk lansia yang mengalami sakit.

Gambar 5.2.

Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2006



Sumber: BPS – Susenas 2006

Gambar 5.2 juga menunjukkan bahwa angka kesakitan penduduk lansia perempuan sedikit lebih rendah dari angka kesakitan penduduk lansia laki-laki dengan perbandingan berturut-turut sebesar 63,99 persen dan 65,23 persen. Bila ditinjau menurut tipe daerah nampak bahwa angka kesakitan penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan (61,94 persen) lebih rendah dibandingkan dengan lansia yang tinggal di daerah perdesaan (66,15 persen). Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk lansia di perkotaan masih lebih baik dibandingkan derajat kesehatan lansia di perdesaan. Kecenderungan serupa juga terlihat baik untuk penduduk lansia laki-laki maupun penduduk lansia perempuan. Angka kesakitan penduduk lansia laki-laki di perkotaan hanya sebesar 62,42 persen, sedangkan di perdesaan mencapai sebesar 66,90 persen. Sementara itu, angka kesakitan penduduk lansia perempuan di perkotaan sebesar 61,50 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 65,47 persen.

Angka kesakitan penduduk lansia yang relatif cukup tinggi dirasakan hampir di seluruh provinsi dengan persentase berkisar antara 55,93 – 84,79 persen, seperti yang disajikan pada Tabel Lampiran 5.2. Angka kesakitan penduduk lansia dari yang paling tinggi secara berturut-turut terdapat di Provinsi Maluku Utara (84,79 persen), Sulawesi Tengah (83,17 persen) dan Papua (79,06 persen). Sebaliknya, angka kesakitan terendah secara berturut-turut terdapat di Provinsi D.I. Yogyakarta (55,93 persen), Sumatera Barat (58,51 persen), dan DKI Jakarta (60,86 persen).

5.3. Lama Sakit

Seseorang yang mengalami keluhan kesehatan sehingga terganggu kegiatan (sakit) dapat berakibat tidak dapat beraktifitas selama sehari-hari. Lama seseorang menderita sakit secara umum mencerminkan intensitas atau derajat sakit serta bobot penyakit yang diderita seseorang. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan bahwa sakit yang dideritanya cukup parah, dan sebaliknya. Pada sisi lain, lama seseorang menderita sakit juga mencerminkan kualitas kesehatan fisik seseorang yang direfleksikan melalui daya tahan tubuh. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan daya tahan tubuhnya terhadap serangan berbagai penyakit sangat lemah, dan sebaliknya.

Pada Tabel 5.b disajikan persentase penduduk lansia yang mengalami sakit menurut lamanya sakit. Dari tabel tersebut diperoleh gambaran bahwa secara umum dari

seluruh penduduk lansia yang sakit, hampir tiga perempatnya mengalami sakit tidak lebih dari seminggu dengan rincian jumlah hari sakit selama 1-3 hari sebesar 35,57 persen dan 4-7 hari sebesar 38,58 persen. Sisanya sebesar 25,85 persen penduduk lansia menderita sakit lebih dari 7 hari (sekitar 8 sampai dengan 30 hari).

Pola umum penduduk lansia yang mengalami sakit tidak lebih dari satu minggu terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan dengan lama hari sakit selama 1-3 hari dan 4-7 hari masing-masing mencapai sebesar 38,55 persen dan 37,35 persen, sedangkan di daerah perdesaan masing-masing tercatat sebesar 33,90 persen dan 39,27 persen. Dari tabel tersebut juga nampak bahwa secara rata-rata lama hari sakit yang diderita penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan tidak jauh berbeda dengan penduduk lansia yang tinggal di daerah perdesaan.

Tabel 5.b. Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, Tahun 2006

Lama Sakit (Hari)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1 – 3	38,55	33,90	35,57
4 – 7	37,35	39,27	38,58
8 – 14	8,36	9,49	9,10
15 – 21	4,05	5,31	4,85
22 – 30	11,69	12,03	11,90
T o t a l	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS – Susenas 2006

Lebih lanjut, jika dilihat menurut provinsi nampak bahwa lama hari sakit penduduk lansia pada masing-masing provinsi cukup bervariasi untuk masing-masing kelompok lama hari sakit namun tetap dominan antara 1-3 hari dan 4-7 hari. Pada kelompok lama sakit 1-3 hari, persentasenya berkisar antara 22,35 - 49,68 persen dan antara 32,88 – 52,08 persen. Pada kelompok lama sakit lansia antara 1-3 hari, provinsi yang mempunyai persentase paling tinggi secara berturut-turut terdapat di Provinsi DKI

Jakarta (49,68 persen), Kalimantan Tengah (44,60 persen) dan D.I. Yogyakarta (43,22 persen). Sebaliknya, pada kelompok lama sakit yang sama, persentase terendah secara berturut-turut terdapat di Provinsi Maluku Utara (22,35 persen), Nusa Tenggara Timur (23,86 persen) dan Irian Jaya Barat (23,91 persen).

5.4. Cara Berobat

Seseorang yang mengalami sakit biasanya melakukan berbagai cara agar kesehatannya cepat kembali pulih dan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti semula. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan berobat. Kebiasaan serta cara berobat yang dilakukan seseorang, merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat apakah orang yang bersangkutan telah memiliki pola perilaku hidup sehat. Pada dasarnya apabila seseorang menderita sakit maka ia harus segera mendapatkan perawatan dan pengobatan agar cepat sembuh. Berobat atau pengobatan bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti berobat sendiri atau mendatangi tempat pelayanan kesehatan, baik modern maupun tradisional, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah pasien.

Tabel 5.c. Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Sendiri menurut Jenis Obat yang Digunakan dan Tipe Daerah, Tahun 2006

Jenis Obat yang Digunakan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tradisional	12,58	14,42	13,75
Modern	48,40	42,64	44,75
Lainnya	5,62	4,85	5,13
Campuran	33,40	38,08	36,37

Sumber: BPS – Susenas 2006

Hasil Susenas 2006 menunjukkan bahwa penduduk lansia yang melakukan cara penyembuhan dengan berobat sendiri sebagian besar menggunakan jenis obat modern yaitu sebesar 44,75 persen, seperti yang disajikan pada Tabel 5.c. Di samping itu, penduduk lansia yang berobat sendiri dengan menggunakan obat campuran atau lebih dari satu jenis obat juga relatif cukup banyak yaitu sebesar 36,37 persen, sedangkan

mereka yang menggunakan jenis obat tradisional dan lainnya (selain obat modern dan tradisional) persentasenya berturut-turut sebesar 13,75 persen dan 5,13 persen.

Tabel 5.c juga menunjukkan bahwa secara umum penduduk lansia yang berada di daerah perkotaan lebih senang menggunakan obat modern dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah perdesaan. Persentase penduduk lansia perkotaan yang menggunakan obat modern tercatat sebesar 48,40 persen, sedangkan penduduk lansia perdesaan sebesar 42,64 persen. Sebaliknya, penduduk lansia di daerah perdesaan lebih menyukai obat tradisional dan obat lainnya dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah perkotaan.

Banyaknya penduduk lansia yang melakukan pengobatan sendiri dengan menggunakan obat modern terlihat di sebagian besar provinsi dengan persentase berkisar antara 28,19 – 66,59 persen. Tiga provinsi yang mempunyai persentase tertinggi secara berturut-turut adalah Provinsi Sulawesi Utara (66,59 persen), Kalimantan Tengah (59,74 persen) dan Jawa Barat (52,27 persen). Sebaliknya, tiga provinsi yang mempunyai persentase terendah secara berturut-turut adalah Provinsi Bali (28,19 persen), Riau (31,71 persen) dan Irian Jaya Barat (31,94 persen).

Selain dengan berobat sendiri, seseorang dapat mengobati sakit yang dideritanya dengan cara berobat jalan. Berobat jalan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat berobat atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di berbagai tempat. Pada Tabel 5.d dapat dilihat bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang paling diminati oleh penduduk lansia untuk berobat jalan berturut-turut adalah puskesmas/puskesmas pembantu (pustu) sebesar 40,89 persen, kemudian tempat praktek dokter sebesar 27,27 persen dan praktek tenaga kesehatan (nakes) sebesar 25,93 persen. Banyaknya penduduk lansia yang berobat ke puskesmas/pustu diduga karena tempat berobat ini umumnya mudah diakses karena lebih dekat dengan rumah, memberikan pelayanan gratis (Askin) dan Askes, lebih murah dan tenaga kesehatan selalu memberi fasilitas serta mementingkan/mendahulukan lansia dalam pelayanan kesehatan (Studi Profil dan Perlindungan Lansia Perempuan di Jawa Timur, Meneg Pemberdayaan Perempuan).

Dari tabel tersebut juga nampak bahwa terdapat kesamaan preferensi antara penduduk lansia laki-laki dan penduduk lansia perempuan dalam memilih jenis

fasilitas/tempat berobat. Namun bila ditinjau berdasarkan tipe daerah terdapat pola yang berbeda dalam memilih jenis fasilitas/tempat berobat untuk berobat jalan antara penduduk lansia di daerah perkotaan dengan penduduk lansia di daerah perdesaan. Jenis fasilitas/tempat berobat jalan yang paling diminati oleh penduduk lansia di daerah perkotaan berturut-turut adalah puskesmas/pustu (35,39 persen), kemudian praktek dokter (34,98 persen) dan praktek tenaga kesehatan (15,77 persen). Sementara penduduk lansia di daerah perdesaan, lebih berminat berobat jalan pada puskesmas/pustu (44,69 persen), kemudian praktek tenaga kesehatan (32,96 persen) dan praktek dokter (21,93 persen). Preferensi ini menunjukkan bahwa tempat berobat di praktek dokter lebih diminati oleh penduduk lansia di daerah perkotaan dibandingkan mereka yang berada di perdesaan karena umumnya berobat di praktek dokter memerlukan biaya yang lebih mahal dan lebih mudah diakses oleh penduduk yang berada di daerah perkotaan.

Tabel 5.d. Proporsi Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah, Tahun 2006

Tempat Berobat	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Rumah sakit pemerintah	16,86	12,05	14,39	9,40	6,04	7,71	12,41	8,53	10,44
Rumah sakit swasta	10,25	7,27	8,72	3,17	2,06	2,61	6,03	4,22	5,11
Praktek Dokter	35,92	34,09	34,98	23,96	19,92	21,93	28,79	25,79	27,27
Puskesmas/Pustu	32,98	37,67	35,39	43,18	46,19	44,69	39,06	42,66	40,89
Praktek tenaga kesehatan	13,58	17,85	15,77	31,77	34,13	32,96	24,43	27,39	25,93
Pengobatan tradisional	2,45	2,55	2,50	2,47	2,65	2,56	2,46	2,61	2,54
Lainnya	0,61	0,65	0,64	0,63	0,70	0,66	0,62	0,68	0,65

Sumber : BPS – Susenas 2006

Tabel Lampiran 5.7.3 menunjukkan bahwa lansia yang sakit dan melakukan usaha penyembuhan dengan berobat ke puskesmas/pustu pada masing-masing provinsi nampak bervariasi yang proporsinya berkisar antara 29,79 – 77,34 persen. Provinsi yang lansianya berobat ke puskesmas/pustu dengan proporsi paling tinggi secara berturut-turut adalah Provinsi Irian Jaya Barat (77,34 persen), Nusa Tenggara Timur (67,84 persen) dan

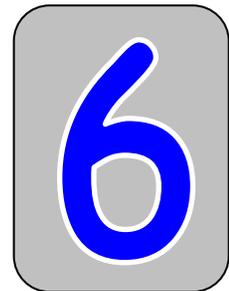
Maluku (64,56 persen). Sebaliknya, provinsi yang mempunyai proporsi terendah secara berturut-turut adalah Provinsi DKI Jakarta (29,79 persen), Sumatera Utara (30,38 persen) dan Bali (31,84 persen).

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



Kegiatan Ekonomi Penduduk Lansia

Penduduk lansia merupakan bagian dari anggota keluarga dan anggota masyarakat yang semakin bertambah jumlahnya sejalan dengan peningkatan usia harapan hidup. Peningkatan jumlah penduduk lansia akan membawa dampak terhadap sosial ekonomi baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam pemerintahan. Implikasi ekonomis yang penting dari peningkatan jumlah penduduk lansia adalah peningkatan dalam rasio ketergantungan usia lanjut (*old age ratio dependency*). Ini berarti bahwa setiap penduduk usia produktif akan menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut (Wirakartakusuma dan Anwar 1994).

Tingginya ketergantungan penduduk lansia terhadap orang lain karena secara umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia mengalami penurunan. Dengan kondisi fisik dan psikis yang menurun menyebabkan mereka kurang mampu menghasilkan pekerjaan yang produktif, sehingga muncul beberapa anggapan

bahwa usia lanjut identik dengan banyak masalah dan beban orang lain. Umumnya lansia di negara-negara berkembang dan negara-negara yang belum memiliki tunjangan sosial untuk hari tua, mereka berusaha untuk akan tetap bekerja dalam upaya memenuhi tuntutan hidup maupun mencukupi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Jadi tidaklah sepenuhnya benar jika dikatakan lansia tidak produktif (e-psikologi, 2006). Oleh karena itu, jika penduduk lanjut usia dapat mengatasi persoalan hidupnya (baik sosial maupun ekonomi), maka tanpa disadari mereka telah ikut aktif dalam upaya untuk tidak tergantung pada orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian angka rasio ketergantungan akan menurun, sehingga beban pemerintah akan berkurang.

Secara normatif, penduduk lansia merupakan kelompok penduduk yang seyogyanya tinggal menikmati hasil dari segenap upaya dan jerih payah yang dilakukannya semasa mereka masih muda. Namun dalam kenyataannya masih cukup banyak penduduk lansia yang tetap bekerja keras untuk mendapatkan hidup secara layak. Sejalan dengan itu dapat dikatakan bahwa secara ekonomis keadaan lanjut usia dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu golongan mantap, kurang mantap dan rawan (Trimarjono, 1997). Golongan mantap adalah para lanjut usia yang berpendidikan tinggi, sempat menikmati kedudukan/jabatan baik, mapan pada usia produktif, sehingga pada usia lanjut dapat mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Pada golongan kurang mantap, lanjut usia kurang berhasil mencapai kedudukan yang tinggi, tetapi sempat mengadakan investasi pada anak-anaknya, misalnya mengantar anak-anaknya ke jenjang pendidikan tinggi, sehingga kelak akan dibantu oleh anak-anaknya. Sedangkan golongan rawan yaitu lanjut usia yang tidak mampu memberikan bekal yang cukup kepada anaknya, sehingga ketika purna tugas datang akan mendatangkan kecemasan karena terancam akan kemunduran tingkat kesejahteraannya.

Tulisan pada bagian ini dimaksudkan untuk melihat gambaran secara makro mengenai kegiatan ekonomi penduduk lansia. Gambaran tersebut secara rinci akan dilihat dari berbagai indikator ketenagakerjaan yang mencakup tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), lapangan usaha, status pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan pekerja dan jumlah jam kerja.

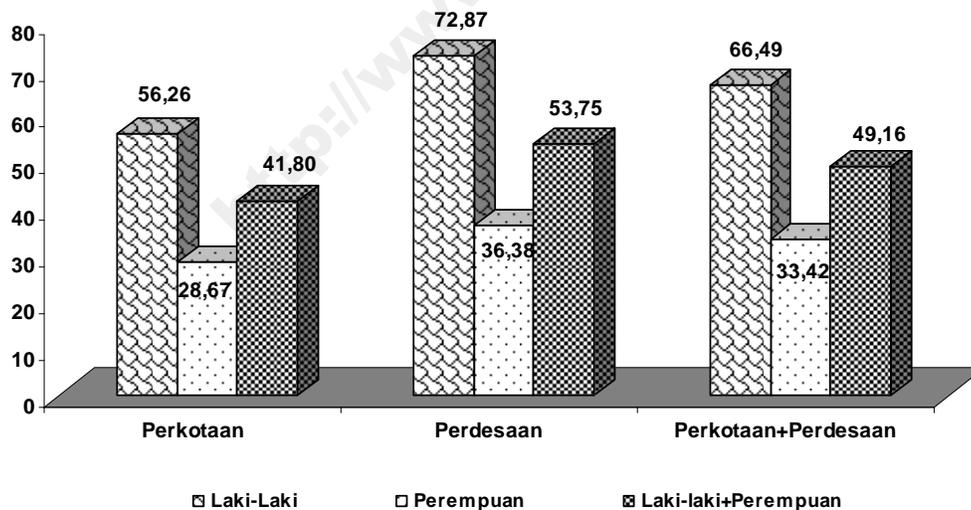
6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Lansia

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja. Dalam hal penduduk lansia, maka angkatan kerja mencakup penduduk lansia yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu lansia yang bekerja dan lansia yang menganggur. Penduduk usia kerja sebagai pembanding adalah penduduk lansia itu sendiri.

Hasil Susenas 2006 menunjukkan bahwa secara nasional TPAK penduduk lansia adalah sebesar 49,16 persen, seperti yang terlihat pada Gambar 6.1. TPAK penduduk lansia di daerah pedesaan (53,75 persen) nampak lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan (41,80 persen). Dilihat menurut jenis kelamin, TPAK penduduk lansia laki-laki cenderung jauh lebih tinggi dibanding dengan penduduk lansia perempuan (66,49 persen berbanding dengan 33,42 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Gambar 6.1.

TPAK Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2006



Sumber: BPS - Susenas 2006

Tabel Lampiran 6.1 menunjukkan bahwa TPAK untuk penduduk lansia pada masing-masing provinsi nampak bervariasi dengan persentase berkisar antara 35,52 – 61,17 persen. TPAK penduduk lansia paling tinggi berturut-turut terdapat di Provinsi Papua (61,17 persen), Kalimantan Tengah (57,95 persen) dan D.I. Yogyakarta (57,16

persen). Sementara itu, TPAK paling rendah berturut-turut terdapat di Kepulauan Riau (35,52 persen), DKI Jakarta (35,62 persen) dan Sulawesi Utara (42,13 persen). Di daerah perkotaan, TPAK penduduk lansia pada masing-masing provinsi berkisar antara 28,23 – 53,65 persen, sedangkan di daerah perdesaan angka tersebut tampak lebih tinggi dengan persentase berkisar antara 43,21 – 64,69 persen.

6.2. Lapangan Usaha

Lapangan usaha dalam ulasan ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertanian (*Agriculture*), industri (*Manufacturing*) dan jasa (*Service*). Kelompok lapangan usaha pertanian mencakup sektor pertanian, kelompok industri mencakup sektor pertambangan/penggalian, industri, listrik/gas/air dan konstruksi, sedangkan kelompok jasa terdiri dari sektor perdagangan, transportasi/komunikasi, keuangan, jasa dan lainnya. Ketiga kelompok sektor ini dikenal sebagai sektor A (*Agriculture*), M (*Manufacturing*) dan S (*Services*).

Tabel 6.a. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, Tahun 2005 dan 2006

Kelompok Lapangan Usaha	2005			2006		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian (A)	37,06	80,29	67,24	32,81	78,07	64,28
Industri (M)	12,64	6,66	8,46	13,79	7,98	9,75
Jasa – Jasa (S)	50,30	13,05	24,30	53,40	13,95	25,97
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2005 dan 2006

Tabel 6.a menyajikan persentase penduduk lansia yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha dan tipe daerah. Pada tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar penduduk lansia (64,28 persen) bekerja pada sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia yang memang merupakan pekerja di sektor pertanian, sektor ini juga merupakan andalan bagi mayoritas pekerja lansia. Selain itu, penduduk lansia yang bekerja di sektor jasa-jasa sebesar 25,97 persen dan sisanya sebesar 9,75

persen bekerja di sektor kelompok industri. Tingginya persentase lansia yang bekerja di sektor pertanian antara lain terkait dengan tingkat pendidikan penduduk lansia yang pada umumnya masih rendah.

Tabel 6.a. juga menunjukkan bahwa struktur pekerjaan penduduk lansia di daerah perkotaan berbeda dengan struktur di perdesaan. Mayoritas para lansia di perkotaan bekerja dikelompok sektor jasa (53,40 persen), sedangkan di perdesaan pada sektor pertanian (78,07 persen).

Tabel Lampiran 6.2.3 menyajikan struktur pekerjaan penduduk lansia pada setiap provinsi. Semua provinsi kecuali di DKI Jakarta menunjukkan pola yang serupa dengan pola secara nasional dengan sektor pertanian (berkisar antara 45,80 – 87,49 persen), jasa (5,95 – 40,10 persen) dan industri (1,40 – 24,28 persen) berturut-turut merupakan sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lansia. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja penduduk lansia di DKI Jakarta adalah jasa sebesar 88,51 persen, dan sisanya berturut-turut sektor industri (9,79 persen) dan pertanian (1,70 persen).

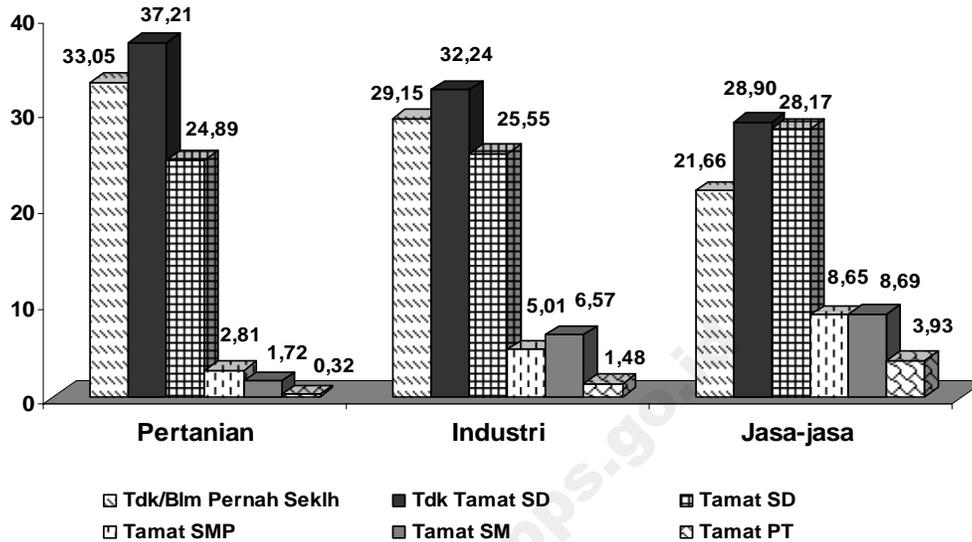
Pola struktur pekerjaan penduduk lansia di daerah perkotaan secara nasional sejalan dengan sektor yang diandalkan oleh penduduk lansia di daerah perkotaan pada masing-masing Provinsi, yaitu terbesar pada sektor jasa, setelah itu disusul oleh sektor pertanian dan industri, kecuali di Provinsi Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Penduduk lansia perkotaan di ketiga provinsi tersebut masih bergantung pada sektor pertanian sebagai andalan utama, seperti yang disajikan pada Tabel Lampiran 6.2.1. Sementara itu, pada Tabel Lampiran 6.2.2 nampak bahwa sektor pertanian masih merupakan andalan utama penduduk lansia di daerah perdesaan pada semua provinsi, disusul oleh kelompok sektor jasa dan industri.

Salah satu faktor yang menentukan struktur pekerjaan penduduk lansia adalah pendidikan yang ditamatkan. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.2. terlihat bahwa pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi, persentase penduduk lansia yang bekerja di sektor pertanian cenderung semakin berkurang. Gambaran ini secara umum mendukung dugaan sebelumnya yaitu bahwa bertumpuknya pekerja lansia di sektor pertanian berkaitan dengan akses untuk memperoleh pekerjaan di sektor ini yang jauh lebih mudah

(bahkan tanpa syarat pendidikan) dibandingkan dengan sektor lainnya yang pada umumnya mensyaratkan kualifikasi/tingkat ketrampilan dan pendidikan tertentu.

Gambar 6.2.

Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kelompok Lapangan Usaha, Tahun 2006



Sumber: BPS - Susenas 2006

6.3. Status Pekerjaan

Status pekerjaan menunjukkan jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan. Pada Tabel 6.b. ditunjukkan bahwa sebagian besar penduduk lansia bekerja dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap (34,28 persen) dan berusaha sendiri (31,83 persen). Selanjutnya disusul oleh mereka yang bekerja dengan status pekerja tidak dibayar (9,93 persen), pekerja bebas pertanian (8,96 persen), buruh/karyawan (7,76 persen), berusaha dibantu buruh tetap (5,00 persen) dan pekerja bebas non pertanian (2,24 persen). Bila dilihat menurut tipe daerah terdapat perbedaan pola status pekerjaan antara penduduk lansia perkotaan dengan perdesaan. Di daerah perkotaan, penduduk lansia yang bekerja dengan berusaha sendiri lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berusaha dibantu buruh tidak tetap (39,77 persen berbanding 22,37 persen), sedangkan di perdesaan berlaku sebaliknya. Selain itu, banyak pula penduduk lansia perkotaan yang menjadi buruh/karyawan, sedangkan di perdesaan lebih banyak yang menjadi pekerja tidak dibayar.

Tabel 6.b. Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan, Tahun 2006

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Ber-usaha sendiri	Ber-usaha dibantu buruh tdk tetap	Ber-usaha dibantu buruh tetap	Buruh/karyawan	Pekerja bebas pertanian	Pekerja bebas non pertanian	Pekerja tidak di bayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan								
Laki-laki	36,89	25,78	8,16	16,43	7,23	3,74	1,76	100,00
Perempuan	45,76	15,23	3,65	10,64	6,16	4,04	14,50	100,00
Laki-laki+Perempuan	39,77	22,37	6,70	14,56	6,88	3,84	5,89	100,00
Perdesaan								
Laki-laki	27,35	48,93	4,99	5,14	9,12	1,64	2,84	100,00
Perempuan	30,40	20,10	2,76	4,04	11,44	1,32	29,94	100,00
Laki-laki+Perempuan	28,35	39,51	4,26	4,78	9,88	1,53	11,70	100,00
Perkotaan+Perdesaan								
Laki-laki	30,26	41,86	5,96	8,59	8,54	2,28	2,51	100,00
Perempuan	35,05	18,63	3,03	6,04	9,84	2,15	25,27	100,00
Laki-laki+Perempuan	31,83	34,28	5,00	7,76	8,96	2,24	9,93	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2006

Di sisi lain bila dilihat menurut gender, persentase penduduk lansia laki-laki lebih banyak bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap (41,86 persen) sedangkan penduduk lansia perempuan lebih banyak yang berusaha sendiri (35,05 persen). Pola yang sama terjadi pada penduduk lansia perempuan perkotaan yaitu sebagian besar (45,76 persen) berusaha sendiri. Namun sebaliknya untuk penduduk lansia perempuan perdesaan lebih banyak yang bekerja dengan status pekerja tidak dibayar yaitu sebesar 29,94 persen. Pekerja lansia perempuan di perdesaan cenderung sifat pekerjaannya adalah membantu keluarga di sawah/kebun atau pada usaha keluarga lainnya.

Seperti terlihat pada Tabel Lampiran 6.3.3, struktur status pekerjaan penduduk lansia di masing-masing provinsi terbagi ke dalam dua pola. Pola yang pertama dengan komposisi status pekerjaan berturut-turut adalah berusaha dibantu buruh dan berusaha sendiri yang terdapat di 18 provinsi. Pola yang sama merupakan pola umum untuk daerah perdesaan (lihat Tabel Lampiran 6.3.2). Pola yang kedua dengan urutan status pekerjaan, yaitu berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap yang terlihat di 12 provinsi.

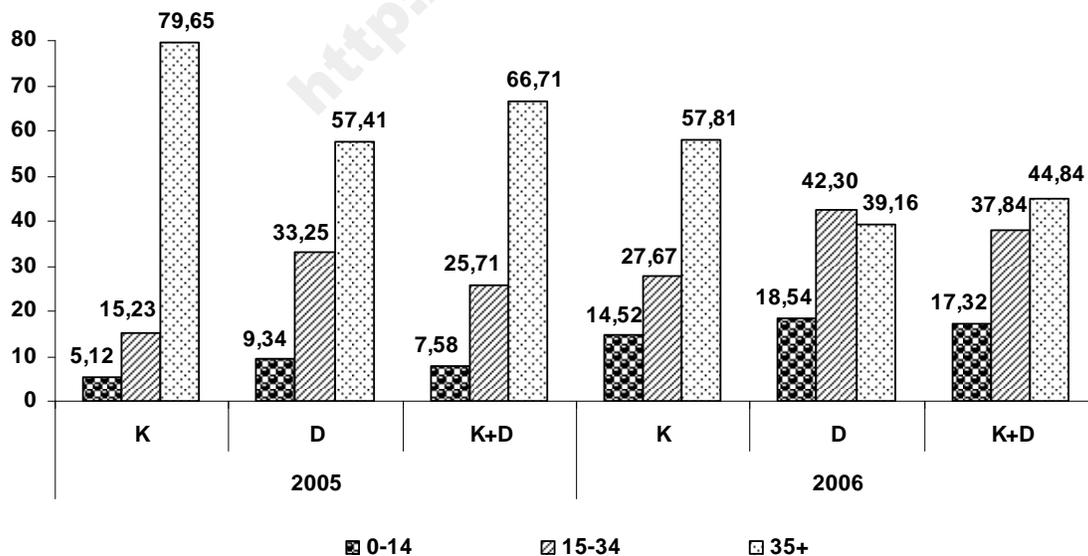
Pola yang sama merupakan pola umum untuk daerah perkotaan (lihat Tabel Lampiran 6.3.1).

6.4. Jumlah Jam Kerja

Produktifitas seseorang dalam bekerja dapat dilihat melalui jumlah jam kerja yang ditekuninya. Gambar 6.3. menyajikan komposisi penduduk lansia yang bekerja menurut jumlah jam kerja dan tipe daerah. Dari gambar tersebut nampak bahwa sebagian besar penduduk lansia (44,84 persen) bekerja dengan jam kerja penuh atau jumlah jam kerja 35 jam ke atas selama seminggu. Sementara itu, lansia yang bekerja dengan jumlah jam kerja antara 15-34 jam seminggu sebesar 37,84 persen dan sisanya adalah mereka yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu yaitu sebesar 17,32 persen. Berdasarkan gambaran di atas dapat dikatakan bahwa lansia cenderung masih mempunyai produktifitas yang tinggi dalam bekerja, sehingga keliru bila ada anggapan lansia itu tidak mampu bekerja penuh dan tidaklah sepenuhnya benar jika dikatakan bahwa lansia tidak produktif, sebab dalam kenyataannya sebagian besar para lansia yang bekerja tetap eksis bekerja dan terus berjuang mencari kehidupan yang lebih baik dengan jam kerja yang penuh.

Gambar 6.3.

Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, Tahun 2005 dan 2006



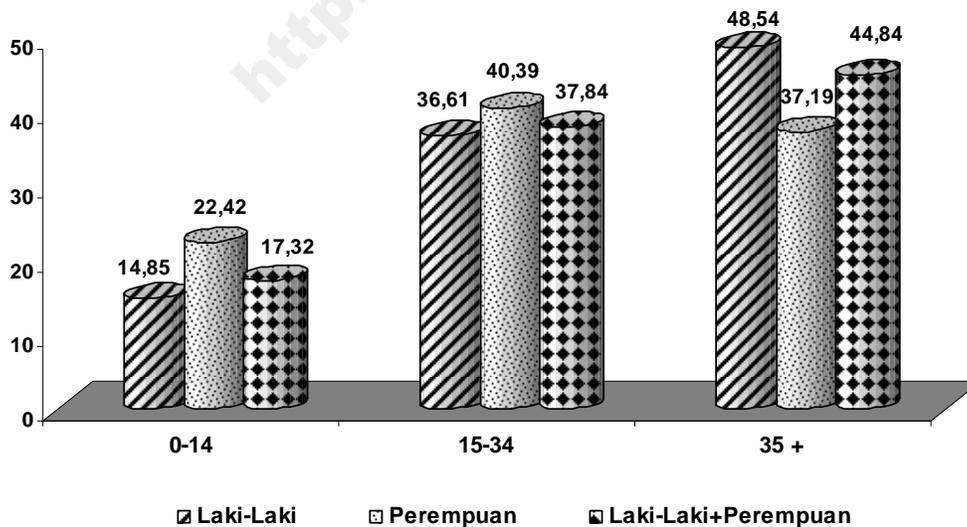
Sumber: BPS - Susenas 2005 dan 2006

Gambar 6.3. juga menunjukkan adanya perbedaan pola distribusi jumlah jam kerja utama seminggu bagi pekerja lansia di daerah perkotaan dan perdesaan. Pada umumnya pekerja lansia di daerah perkotaan cenderung bekerja dengan jam kerja penuh dengan persentase sebesar 57,81 persen. sedangkan persentase mereka yang bekerja penuh di daerah perdesaan hanya sebesar 39,16 persen. Sebaliknya, persentase lansia yang bekerja selama 0 – 14 jam dan 15 – 34 jam di daerah perdesaan relatif lebih tinggi dibanding dengan daerah perkotaan. Hal ini sesuai dengan sektor dominan di perdesaan adalah pertanian yang tidak mempunyai target waktu kerja per hari seperti sektor formal (jasa dan industri).

Namun bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2005, tingkat produktivitas pekerja lansia pada tahun 2006 mengalami penurunan pada mereka yang bekerja dengan jam kerja penuh (66,71 persen tahun 2005 menjadi 44,84 persen pada tahun 2006). Sebaliknya, lansia yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0 -14 jam dan 15 -34 jam mengalami kenaikan dari tahun 2005 ke tahun 2006. Hal ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Gambar 6.4.

Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu Terakhir, Tahun 2006



Sumber: BPS - Susenas 2006

Dilihat menurut gender, tingkat produktivitas pekerja lansia laki-laki tampak cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan, hal ini tercermin dari

lebih rendahnya proporsi lansia perempuan yang bekerja diatas jam kerja normal (lebih dari 35 jam). Gambar 6.4 menunjukkan bahwa, pekerja lansia laki-laki yang bekerja dengan jam kerja penuh mencapai sebesar 48,54 persen, sedangkan pekerja lansia perempuan persentasenya hanya sebesar 37,19 persen. Sebaliknya, persentase lansia perempuan yang bekerja dengan jumlah jam kerja 0-14 jam dan 15-34 jam proporsinya sedikit lebih tinggi dari lansia laki-laki. Pola yang sama terjadi pada semua provinsi (Tabel lampiran 6.4.1 s/d 6.4.3).

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



Kegiatan Sosial Penduduk Lansia

Seseorang yang telah mencapai usia lanjut mengalami penurunan kondisi fisik dan non fisik baik pada segi ekonomis, kesehatan maupun sosial. Untuk itu, dukungan sosial dari orang lain akan sangat berharga antara lain menambah ketentraman hidupnya. Namun demikian, penurunan kondisi fisik dan mental serta adanya dukungan sosial tersebut tidaklah berarti bahwa seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia hanya tinggal duduk, diam/tenang, tanpa melakukan aktivitas apapun. Bahkan pada usia lanjut seseorang dianjurkan masih tetap beraktivitas sesuai dengan kemampuannya agar ketahanan fisik dan mentalnya tetap terjaga secara prima. Umumnya lansia dapat melakukan aktifitas sosial yang secara fisik relatif ringan, tetapi sangat berguna bagi mental spiritual seseorang. Lansia dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat baik di dalam rumah maupun luar rumah dalam kegiatan sosial budaya. Untuk melihat gambaran kegiatan sosial budaya penduduk lansia, berikut ini akan diuraikan gambaran mengenai kegiatan sosial lansia hasil Susenas 2006.

7.1. Akses Terhadap Media Massa

Pada masa lansia kesempatan untuk memperoleh informasi lebih leluasa karena waktu senggangnya relatif banyak. Umumnya pada masa ini, bekerja bukanlah hal yang utama bagi mereka. Lansia lebih banyak meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan sosial atau mengerjakan hobbinya. Untuk mengisi waktu luangnya, umumnya mereka membaca surat kabar/majalah/buku sebagai penambah pengetahuan atau pengembangan hobbi mereka. Akses terhadap media massa antara lain untuk melihat seberapa banyak lansia yang melakukan kegiatan membaca, menonton TV, mendengarkan radio dan menonton pertunjukan kesenian.

7.1.1. Kegiatan Membaca

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan lansia dalam mengisi waktu luangnya adalah dengan membaca. Jenis bacaan dapat berupa surat kabar, majalah, buku-buku baik buku cerita maupun buku pengetahuan. Tabel 7.a menunjukkan bahwa secara umum minat baca para lansia masih sangat rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh kemampuan baca tulis (melek aksara) lansia Indonesia masih rendah. Dari sisi fisik, kemampuan mata lansia dalam membaca juga menurun. Dari seluruh populasi lansia, hanya sebesar 9,36 persen lansia yang melakukan kegiatan membaca surat kabar. Sementara itu, lansia yang membaca majalah, buku pengetahuan dan buku cerita juga relatif sangat sedikit, yaitu berturut-turut 2,58 persen, 2,45 persen dan 0,40 persen. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa minat baca penduduk lansia di daerah perkotaan cukup tinggi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perdesaan, terutama mereka yang membaca surat kabar di daerah perkotaan enam kali lipat lebih banyak dibanding persentase lansia di daerah perdesaan (19,95 persen berbanding 3,33 persen).

Bila dilihat menurut gender, persentase lansia laki-laki yang membaca baik surat kabar, majalah maupun buku cerita dan pengetahuan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia perempuan. Pola yang sama terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 7.a. Proporsi Penduduk Lansia yang Membaca Surat Kabar, Majalah, Buku Cerita dan Buku Pengetahuan Selama Seminggu Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Bacaan, Tahun 2006

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Jenis Bacaan			
	Surat Kabar	Majalah	Buku Cerita	Buku Pengetahuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
- Laki-laki	29,32	6,20	0,71	5,14
- Perempuan	9,96	5,15	0,46	1,86
- Laki-laki+Perempuan	19,95	5,66	0,58	3,44
Perdesaan				
Laki-laki	5,85	1,10	0,44	2,70
Perempuan	1,02	0,33	0,14	1,07
Laki-laki+Perempuan	3,33	0,70	0,29	1,85
Perkotaan+Perdesaan				
Laki-laki	14,76	3,04	0,55	3,63
Perempuan	4,40	2,16	0,27	1,37
Laki-laki+Perempuan	9,36	2,58	0,40	2,45

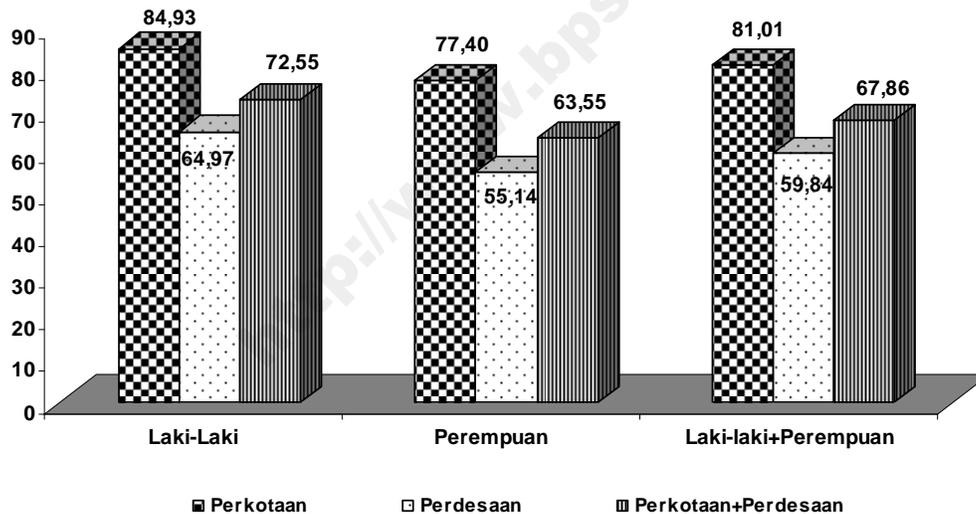
Sumber: BPS - Susenas 2006

Tabel Lampiran 7.1.3 menunjukkan distribusi persentase lansia yang membaca surat kabar/majalah/buku menurut provinsi, tipe daerah dan jenis kelamin. Pada umumnya lansia lebih menyukai membaca surat kabar daripada membaca buku atau majalah, hal ini terjadi pada seluruh provinsi, kecuali untuk Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur persentase lansia yang membaca buku lebih besar daripada yang membaca surat kabar. Persentase lansia yang membaca surat kabar menurut provinsi, secara berturut-turut persentase tertinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta (40,24 persen), Sulawesi Utara (22,36 persen) dan Kalimantan Timur (18,05 persen). Sebaliknya, provinsi yang mempunyai persentase terendah secara berturut-turut adalah Nusa Tenggara Barat (3,51 persen), Nusa Tenggara Timur (3,57 persen) dan Sulawesi Tenggara (5,36 persen).

7.1.2. Menonton Televisi dan Pertunjukan Kesenian

Menonton televisi merupakan kegiatan yang disukai oleh sebagian besar penduduk lansia, seperti yang terlihat pada Gambar 7.1. Dari keseluruhan penduduk lansia, 67,86 persen diantaranya melakukan kegiatan menonton televisi. Kegiatan ini dilakukan oleh penduduk lansia laki-laki maupun perempuan, namun persentase lansia laki-laki yang menonton televisi (72,55 persen) lebih besar dibandingkan dengan lansia perempuan (63,55 persen). Keadaan ini berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa televisi merupakan media audio visual yang sangat disukai oleh para lansia, baik laki-laki ataupun perempuan yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Gambar 7.1. Persentase Penduduk Lansia yang Menonton Televisi Seminggu Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2006



Sumber: BPS-Susenas Modul 2006

Pada Gambar 7.1 juga ditunjukkan bahwa kegiatan menonton televisi seminggu yang lalu dilakukan oleh lansia baik yang berada di daerah perkotaan maupun perdesaan. Satu hal yang menarik dari gambaran tersebut adalah persentase lansia yang menonton televisi di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan lansia yang berada di perdesaan (81,01 persen berbanding 59,84 persen).

Tabel Lampiran 7.2 menunjukkan gambaran mengenai lansia yang menonton televisi menurut provinsi, tipe daerah dan jenis kelamin. Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa minat lansia untuk menonton televisi antar provinsi persentasenya sangat bervariasi, yaitu berkisar antara 17,88 – 90,40 persen. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi secara berturut-turut terdapat di Provinsi DKI Jakarta (90,40 persen), Bangka Belitung (81,53 persen) dan Sulawesi Utara (78,39 persen). Sebaliknya, persentase terendah berada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (17,88 persen), Papua (38,04 persen) dan Irian Jaya Barat (41,86 persen).

Tabel 7.b. Proporsi Penduduk Lansia yang Menonton Pertunjukan Kesenian Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Pertunjukan, Tahun 2006

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Seni Tari	Seni Musik	Seni Drama	Seni Lukis	Seni Patung	Seni Keraji- nan	Lain- nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan :							
Laki-laki	50,05	67,08	36,07	4,68	4,09	7,02	7,33
Perempuan	44,62	73,02	31,88	5,15	6,74	7,44	6,71
L+P	47,58	69,78	34,17	4,90	5,30	7,21	7,05
Perdesaan :							
Laki-laki	54,58	61,44	27,17	2,52	0,99	2,40	5,24
Perempuan	56,56	59,22	24,31	1,37	0,88	1,78	4,13
L+P	55,39	60,53	26,00	2,05	0,95	2,14	4,78
K + D :							
Laki-laki	52,82	63,63	30,63	3,36	2,19	4,19	6,05
Perempuan	51,39	65,19	27,58	3,01	3,42	4,23	5,24
L+P	52,21	64,30	29,33	3,21	2,72	4,21	5,71

Sumber : BPS, Susenas Modul 2006

Berbeda dengan minat lansia untuk menonton televisi yang relatif cukup besar, minat penduduk lansia untuk menonton pertunjukan kesenian masih sangat rendah. Hasil Susenas 2006 menunjukkan bahwa dari keseluruhan penduduk lansia, hanya sekitar 7,03 persen diantaranya yang melakukan kegiatan menonton pertunjukan kesenian. Jenis kesenian yang paling banyak ditonton oleh lansia adalah seni musik, selain itu mereka juga gemar menonton seni tari dan drama. Tabel 7.b menampilkan bahwa dari banyaknya

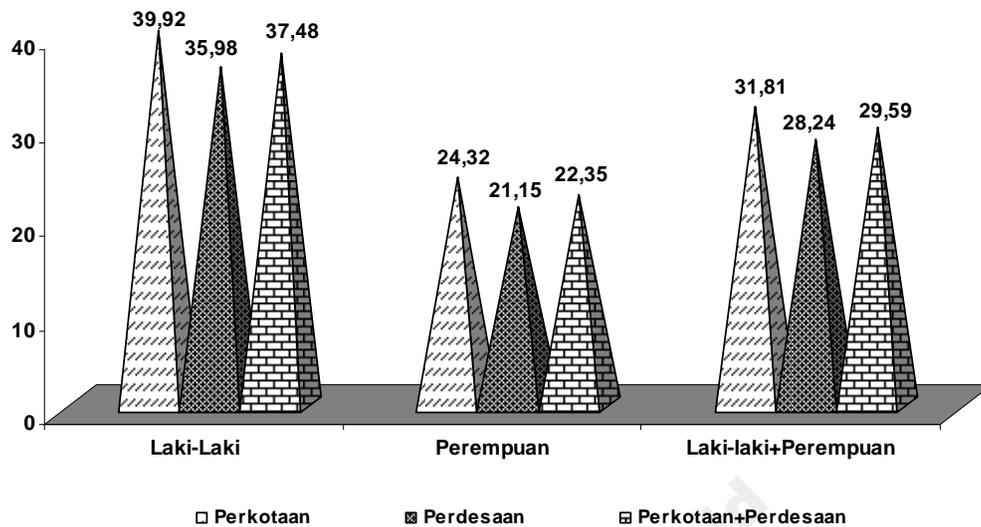
penduduk lansia yang menonton pertunjukan kesenian, sebesar 64,30 persen diantaranya gemar menonton seni musik. Di sisi lain, seni tari dan seni drama juga ditonton berturut-turut oleh sekitar 52,21 persen dan 29,33 persen penduduk lansia. Sementara untuk seni lukis, patung dan kerajinan yang dipamerkan hanya ditonton oleh sekitar 2 – 6 persen penduduk lansia. Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase lansia laki-laki lebih tinggi dibanding lansia perempuan untuk beberapa jenis pertunjukan kesenian kecuali untuk jenis seni musik, patung dan kerajinan. Pola yang sama terjadi di daerah perkotaan, namun untuk daerah perdesaan persentase lansia laki-laki yang menonton seni musik lebih besar dibandingkan lansia perempuan meskipun perbedaannya relatif cukup kecil.

7.1.3. Mendengarkan Radio

Kegiatan lain yang juga dilakukan oleh penduduk yang tergolong usia lanjut dalam mengisi waktu luangnya adalah mendengarkan radio. Gambar 7.2 memperlihatkan bahwa hampir sepertiga (29,59 persen) dari penduduk lansia mendengarkan radio selama seminggu terakhir. Hal yang sama dilakukan oleh lansia baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan, namun persentase lansia di perkotaan (31,81 persen) sedikit lebih besar dibandingkan lansia di perdesaan (28,24 persen). Secara umum lansia laki-laki lebih berminat untuk mendengarkan radio dibandingkan dengan lansia perempuan. Pola seperti ini terjadi di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Sebagai ilustrasi, persentase lansia laki-laki yang melakukan kegiatan mendengarkan radio adalah sebesar 37,48 persen dan lansia perempuan sebesar 22,35 persen untuk kegiatan yang sama.

Tabel Lampiran 7.3 memberikan gambaran mengenai lansia yang mendengarkan radio menurut provinsi, tipe daerah dan jenis kelamin. Persentase lansia yang mendengarkan radio menurut provinsi cukup bervariasi yaitu angkanya berkisar antara 12,73 – 39,57 persen. Persentase tertinggi secara berturut-turut berada pada Provinsi Kepulauan Riau (39,57 persen), Bali (39,12 persen) dan Gorontalo (37,79 persen). Sebaliknya, persentase terendah secara berturut-turut berada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (12,73 persen), Nanggroe Aceh Darussalam (14,13 persen) dan Sulawesi Tenggara (17,99 persen).

Gambar 7.2. Persentase Penduduk Lansia yang Mendengarkan Radio Seminggu Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2006

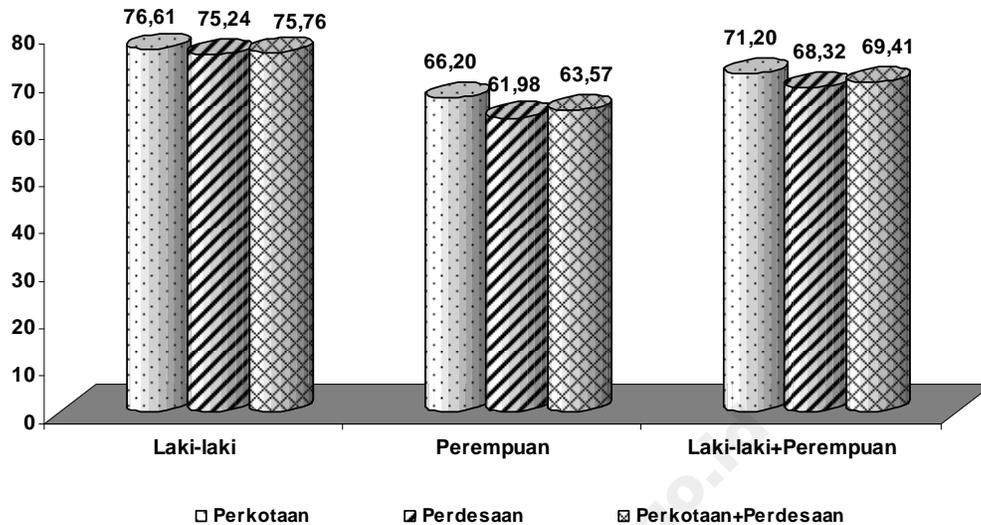


Sumber: BPS-Susenas Modul 2006

7.2. Partisipasi Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Partisipasi dalam kegiatan sosial tidak hanya dilakukan oleh penduduk muda dan dewasa saja tetapi juga dilakukan oleh para lansia. Hal ini terbukti dari banyaknya lansia yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti yang disajikan pada Gambar 7.3. Dari gambar tersebut terlihat bahwa lebih dari separuh (69,41 persen) penduduk lansia mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan selama tiga bulan terakhir. Persentase penduduk lansia di perkotaan (71,20 persen) yang mengikuti kegiatan sosial nampak sedikit lebih tinggi daripada penduduk lansia di perdesaan (68,32 persen). Bila dilihat menurut jenis kelamin, partisipasi penduduk lansia laki-laki lebih tinggi dibanding dengan lansia perempuan (75,76 persen berbanding 63,57 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Gambar 7.3. Persentase Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Selama 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2006



Sumber: BPS-Susenas Modul 2006

Tabel 7.c menampilkan persentase lansia yang menjadi anggota organisasi menurut jenis organisasi, jenis kelamin dan tipe daerah. Jenis kegiatan sosial kemasyarakatan yang paling banyak diminati penduduk lansia adalah kegiatan keagamaan. Lebih dari separuh (55,27 persen) penduduk lansia mengikuti kegiatan keagamaan. Minat yang cukup tinggi para lansia pada kegiatan keagamaan ini kemungkinan karena kondisi sekarang lebih memungkinkan mereka untuk mengisi kehidupan rohaninya dan lebih mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan ketentraman hidup. Selain itu, kegiatan yang juga banyak diminati penduduk lansia adalah kegiatan organisasi kematian (43,50 persen) dan sosial (23,90 persen), sedangkan arisan diminati oleh sekitar 15,40 persen lansia serta kegiatan lainnya 9,95 persen. Kegiatan lainnya termasuk di dalamnya kesenian dan olah raga.

Bila dilihat perbedaan menurut jenis kelamin, umumnya partisipasi mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan untuk beberapa jenis organisasi bagi lansia laki-laki lebih tinggi dibanding lansia perempuan, kecuali untuk kegiatan arisan persentase lansia perempuan lebih tinggi dibanding lansia laki-laki (17,09 persen berbanding 13,55 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Pada Tabel 7.c juga ditunjukkan bahwa jenis organisasi yang diminati lansia perkotaan dalam mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan mempunyai pola yang sama dengan lansia yang berada di perdesaan. Jenis kegiatan yang banyak diikuti lansia di perkotaan secara berturut-turut adalah kegiatan keagamaan (58,84 persen), kematian (41,70persen) dan sosial (25,90 persen), sementara untuk daerah perdesaan minat lansia pada ketiga organisasi tersebut mempunyai pola yang sama dan secara berturut-turut proporsinya adalah 53,09 persen, 44,50 persen dan 22,60 persen.

Tabel 7.c. Proporsi Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Organisasi, Tahun 2006

Tipe daerah/ Jenis Kelamin	Keagamaan	Arisan	Sosial	Kematian	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan :					
Laki-laki	63,59	14,99	31,90	48,00	10,50
Perempuan	54,45	21,63	20,20	35,80	7,18
L+P	58,84	18,44	25,90	41,70	8,77
Perdesaan :					
Laki-laki	59,86	12,67	28,00	51,40	12,50
Perempuan	46,88	14,33	17,70	38,20	9,02
L+P	53,09	13,54	22,60	44,50	10,70
K + D :					
Laki-laki	61,28	13,55	29,50	50,20	11,70
Perempuan	49,74	17,09	18,70	37,30	8,33
L+P	55,27	15,40	23,90	43,50	9,95

Sumber : BPS, Susenas Modul 2006

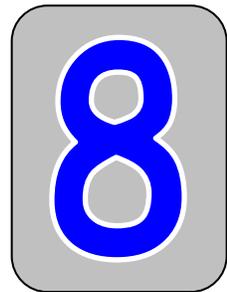
Tabel Lampiran 7.4.3 menunjukkan proporsi lansia yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan menurut provinsi dan jenis organisasi. Hampir di semua provinsi mempunyai pola urutan yang sama dengan nasional dalam memilih jenis kegiatan sosial kemasyarakatan, dimana jenis kegiatan keagamaan paling banyak diminati kecuali untuk beberapa provinsi jenis kegiatan yang paling banyak diminati adalah kegiatan kematian. Proporsi lansia yang mengikuti kegiatan keagamaan pada masing-masing provinsi cukup bervariasi yaitu antara 24,05 – 86,29 persen. Proporsi tertinggi secara berturut-turut berada pada Provinsi Sulawesi Utara (86,29 persen), Irian Jaya Barat (72,97 persen) dan

Riau (71,00 persen). Sebaliknya, proporsi terendah secara berturut-turut berada pada Provinsi Sulawesi Selatan (24,05 persen), Sulawesi Tenggara (28,42 persen) dan Bangka Belitung (29,42 persen).

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



Penduduk Lansia Terlantar

Menurunnya kondisi fisik maupun non fisik dari penduduk lansia cenderung mengakibatkan berkurangnya kemampuan dari segi kesehatan dan ekonomis. Kurangnya kemampuan dalam beberapa hal akan menimbulkan berbagai masalah. Permasalahan yang mungkin akan muncul dari segi ekonomis adalah menurunnya tingkat produktifitas bahkan pada akhirnya tidak mampu lagi melakukan kegiatan mencari nafkah, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya sehingga akan membuat mereka semakin tergantung pada pihak lain. Departemen Sosial mengidentifikasi beberapa permasalahan lainnya yang mungkin akan timbul seperti jumlah penduduk lanjut usia yang berada di bawah garis kemiskinan tetap besar. Demikian pula berkurangnya perhatian anggota keluarga lain karena perubahan budaya, sehingga para lansia menjadi tersisih dan terlantar. Lansia yang berpotensi terlantar antara lain disebabkan mereka tidak mempunyai keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya atau tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan minimumnya, baik jasmani, rohani maupun sosial (PP Nomor 13 Tahun 1998).

Seperti halnya permasalahan sosial yang lain, persoalan para lansia yang terlantar juga membutuhkan perhatian masyarakat dan pemerintah. Sesuai dengan UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, program pemerintah dalam penanganan terhadap penduduk lansia lebih menekankan pemberian santunan kepada mereka yang terlantar. Namun, saat ini kebijakan tersebut mempunyai sasaran yang lebih luas dengan memberikan dorongan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan lansia kepada keluarga dan masyarakat agar dapat mendukung terwujudnya lansia yang berguna, berkualitas dan mandiri (Jutaan lansia butuh pelayanan sosial; Suara Karya, 27 April 2004).

8.1. Distribusi Lansia Terlantar

Penduduk lansia dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian : lansia terlantar yaitu penduduk lansia yang tidak/belum mampu memenuhi kebutuhan minimalnya untuk dapat hidup secara layak, hampir terlantar yaitu lansia yang berpotensi untuk menjadi lansia terlantar, dan lansia tidak terlantar. Pada Tabel 8.a disajikan jumlah dan persentase lansia menurut kategori keterlantaran. Tabel tersebut menggambarkan bahwa dari keseluruhan penduduk lansia di Indonesia tahun 2006 yang berjumlah sekitar 17,5 juta jiwa, 15,28 persen diantaranya termasuk kategori lansia terlantar, 58,09 persen termasuk kategori lansia tidak terlantar, dan sisanya 26,63 persen termasuk kategori lansia hampir terlantar. Melihat masih banyaknya penduduk lansia yang tergolong terlantar dan hampir terlantar diperlukan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak, dalam hal ini tidak saja pemerintah melainkan juga dari anggota keluarga dan masyarakat.

Bila diperhatikan menurut jenis kelamin, persentase lansia laki-laki terlantar (15,86 persen) lebih tinggi dibanding lansia perempuan terlantar (14,74 persen). Kondisi tersebut terutama terlihat di daerah perdesaan, sedangkan di daerah perkotaan berlaku sebaliknya yaitu persentase lansia perempuan terlantar sedikit lebih tinggi daripada lansia laki-laki terlantar (9,24 persen berbanding 9,16 persen).

Tabel 8.a. Jumlah (dalam ribuan) dan Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kategori Keterlantaran, Tahun 2006

Tipe daerah/ Jenis Kelamin	Terlantar		Hampir terlantar		Tidak Terlantar		Total	
	Jumlah (000)	persen	Jumlah (000)	persen	Jumlah (000)	persen	Jumlah (000)	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan								
Laki-laki	295,0	9,16	665,9	20,67	2.261,1	70,18	3.222,0	100,00
Perempuan	322,3	9,24	731,7	20,97	2.435,6	69,80	3.489,6	100,00
L + P	617,3	9,20	1.397,5	20,82	4.696,7	69,98	6.711,6	100,00
Perdesaan								
Laki-laki	1.051,3	19,97	1.587,8	30,15	2.626,5	49,88	5.265,6	100,00
Perempuan	1.038,1	18,08	1.733,2	30,19	2.969,3	51,73	5.740,6	100,00
L + P	2.089,4	18,98	3.321,0	30,17	5.595,8	50,84	11.006,2	100,00
Perkotaan + Perdesaan								
Laki-laki	1.346,3	15,86	2.253,6	26,55	4.887,6	57,59	8.487,6	100,00
Perempuan	1.360,4	14,74	2.464,9	26,70	5.404,9	58,56	9.230,2	100,00
L + P	2.706,7	15,28	4.718,5	26,63	10.292,5	58,09	17.717,8	100,00

Sumber : BPS - Susenas Modul, 2006

Menurut tipe daerahnya, persentase lansia terlantar di daerah perdesaan (18,98 persen) jauh lebih besar bila dibandingkan di daerah perkotaan (9,20 persen). Tingginya persentase lansia di daerah perdesaan yang terlantar bila dibandingkan dengan lansia di daerah perkotaan memberikan indikasi bahwa lansia yang tinggal di daerah perdesaan kondisinya lebih memprihatinkan bila dibandingkan dengan lansia yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini mungkin sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana kehidupan di perkotaan yang jauh lebih baik dibanding perdesaan, serta taraf hidup penduduk perkotaan yang relatif lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan.

Sementara itu, persentase lansia hampir terlantar dan lansia tidak terlantar di daerah perkotaan jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan persentase lansia dengan kategori yang sama di daerah perdesaan. Sekitar 30,17 persen lansia di daerah perdesaan termasuk kategori lansia hampir terlantar dan 50,84 persen termasuk kategori lansia tidak terlantar, sedangkan untuk lansia yang tinggal di daerah perkotaan 20,82 persen diantaranya termasuk kategori hampir terlantar dan 69,98 termasuk kategori lansia tidak terlantar.

Tabel Lampiran 8.1.3 memberikan gambaran mengenai lansia menurut provinsi dan kategori keterlantaran. Salah satu kategori keterlantaran tersebut menunjukkan gambaran mengenai persentase lansia terlantar menurut provinsi yang sangat bervariasi antara 7,31 – 48,37 persen. Persentase tertinggi lansia terlantar secara berturut-turut berada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (48,37 persen), kemudian diikuti Provinsi Papua (41,82 persen) dan Nusa Tenggara Barat (32,18 persen). Sebaliknya, persentase terendah secara berturut-turut berada pada Provinsi Bangka Belitung (7,31 persen), Maluku (8,68 persen) dan DKI Jakarta (9,15 persen).

8.2. Hubungan Karakteristik Rumah Tangga dengan Keterlantaran Lansia

Status ekonomi rumah tangga merupakan salah satu karakteristik rumah tangga yang dapat mempengaruhi keterlantaran lansia. Hal ini sejalan pula dengan pernyataan Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Depsos, Sri Pudji Hastuti, “Kemiskinan dan kecacatan merupakan faktor terbesar lansia menjadi terlantar” (Suara Karya, 27 April 2004).

Tabel 8.b. Persentase Lansia menurut Status Ekonomi Rumah Tangga dan Kategori Keterlantaran, Tahun 2006

Status Ekonomi Rumah Tangga	Terlantar	Hampir terlantar	Tidak Terlantar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40 persen Rendah	50,72	40,87	30,42	36,30
40 persen Menengah	34,97	40,43	41,93	40,47
20 persen Tinggi	14,31	18,70	27,66	23,23
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS - Susenas Modul, 2006

Tabel 8.b. memperlihatkan pola hubungan antara status ekonomi rumah tangga dengan keterlantaran lansia. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, jumlah lansia yang hampir terlantar maupun lansia terlantar semakin menurun. Hal ini terlihat dari proporsi lansia terlantar untuk kelompok 40 persen rumah tangga berpengeluaran menengah dan kelompok 40 persen berpengeluaran rendah mencapai sebesar 34,97 persen dan 50,72 persen, sedangkan proporsi jumlah lansia

terlantar pada kelompok 20 persen rumah tangga berpengeluaran tinggi hanya sebesar 14,31 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga berpendapatan rendah lebih berpotensi untuk membentuk lansia terlantar dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan lebih tinggi. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa status ekonomi rumah tangga merupakan salah satu variabel yang valid untuk digunakan sebagai salah satu ciri dalam mengidentifikasi rumah tangga lansia terlantar.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



Pelayanan Sosial bagi Lansia (Hasil kunjungan ke daerah)

9.1. Pelayanan Panti Werdha (Hasil kunjungan ke Panti Werdha)

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul pada lansia, pemerintah melalui Depsos, Depkes dan instansi terkait lainnya serta beberapa pihak lain yang peduli terhadap lansia telah menyusun berbagai program pelayanan kesejahteraan sosial bagi para lansia. Salah satu program pelayanan sosial yang dilakukan pemerintah dan lembaga swasta lainnya adalah pelayanan sosial lansia melalui panti (lansia ditempatkan dalam panti diberikan jaminan tempat tinggal, jaminan hidup dan kesehatan).

Hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan beberapa pejabat daerah dan pengelola Panti Werdha dalam menangani masalah lanjut usia diperoleh informasi bahwa pada umumnya hampir di semua daerah kunjungan, penduduk lanjut usia belum mendapatkan penanganan secara khusus. Penanganan yang ada masih sangat terbatas pada penyediaan Panti Werdha, yang umumnya dikelola oleh suatu yayasan ataupun oleh pemerintah daerah. Secara garis besar ada 3 jenis Panti Werdha, yaitu:

- a. Panti Werdha yang dikelola oleh pemerintah daerah, umumnya semua biaya operasional sehari-hari dijamin oleh pemerintah daerah melalui APBD, sehingga seluruh penghuninya tidak dikenakan biaya.
- b. Panti Werdha yang dikelola oleh yayasan biasanya memungut biaya secara bulanan dari keluarga penghuni panti. Dalam hal ini, Dinas Sosial biasanya hanya memberikan bimbingan secara teknis dan bantuan material yang relatif masih sangat terbatas, biaya operasional sehari-hari menjadi tanggung jawab yayasan.
- c. Panti Werdha yang dikelola yayasan, namun seluruh penghuninya tidak dikenakan biaya karena yayasan tersebut mempunyai donatur tetap yang mampu membiayai kebutuhan operasional sehari-hari.

Panti Werdha secara umum berkapasitas antara 50 – 170 orang yang diperuntukkan bagi lansia laki-laki dan perempuan. Sepertiga penghuni panti adalah lansia laki-laki. Para lansia yang datang ke panti sebagian besar berasal dari kota yang terdekat dengan lokasi panti. Usia penghuni panti berkisar antara 60 – 90 tahun. Petugas yang menangani para lansia sekitar 20 – 40 orang dan mereka ada yang bertugas menangani lansia langsung dan ada yang bertugas di bagian administrasi.

Pengelola Panti Werdha menginginkan agar para lansia yang merasa sudah tidak produktif lagi bersedia tinggal di panti. Menurut pengelola Panti Sosial Tuna Werdha (PSTW), Panti Werdha mempunyai target dan tujuan yang mulia, yaitu berusaha untuk dapat mensejahterakan lahir batin serta kehidupan sosialnya bagi seluruh penghuninya. Di samping itu, tinggal dipanti semua kebutuhan dasar hidup sehari-hari dipenuhi oleh pengelolanya, mereka diberi makan setiap hari sesuai kebutuhan dan porsi para lansia.

Aktivitas sehari-hari ditata sedemikian rupa sehingga tercipta kegiatan yang dapat membuat para penghuni untuk saling berinteraksi secara sosial dalam suatu kegiatan keagamaan, kesenian ataupun olah raga (ringan). Bahkan ada pula yang diajak untuk rekreasi secara bersama-sama.

Lansia yang tinggal di Panti Werdha dan masih ingin aktif secara ekonomis akan diberikan bimbingan ketrampilan sesuai dengan kemampuan dan kepandaianya, sehingga mereka masih dapat menambah penghasilan dari hasil kegiatannya. Secara umum kreatifitas penghuni Panti Werdha berusaha untuk senantiasa dikembangkan.

Panti Werdha juga menyediakan fasilitas kesehatan berupa klinik yang ditangani oleh perawat guna memberikan bantuan pertama bila ada yang sakit. Selain itu ada pula yang menyediakan mobil ambulans bila sewaktu-waktu diperlukan. Apabila penghuni panti sakit parah, mereka akan diantar ke rumah sakit rujukan yang terdekat.

Bantuan untuk Panti Werdha tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi juga datang dari swasta, organisasi maupun perorangan. Biasanya bantuan-bantuan tersebut berupa antara lain:

- a. Makanan, biasanya berupa makanan jadi yaitu makanan kering ataupun makanan basah.
- b. Obat-obatan, biasanya berupa obat-obatan ringan seperti minyak angin, obat batuk, obat flu dan lain sebagainya.
- c. Sembako, biasanya berupa beras, gula, minyak goreng, teh dan sebagainya.
- d. Pakaian layak, yang berupa pakaian bekas yang masih layak pakai.
- e. Alat-alat kebersihan, yang berupa sapu, pembersih lantai, pembersih kaca dan lain sebagainya.

Keberadaan lansia di Panti Werdha dikarenakan beberapa alasan, antara lain:

- a. Atas kemauan sendiri seseorang lansia tinggal di Panti Werdha, biasanya lansia yang tinggal di panti atas kemauan sendiri karena sudah tidak mempunyai keluarga atau famili.
- b. Dimasukan oleh tokoh atau pemuka masyarakat ke Panti Werdha karena lansia tersebut dalam kehidupan sehari-hari serba kekurangan dan tidak mempunyai keluarga atau famili.
- c. Disarankan oleh keluarga lansia itu sendiri.

Pada awalnya, para lansia tidak berminat tinggal di Panti Werdha, namun lama kelamaan mereka menjadi senang tinggal di Panti Werdha bahkan beberapa penghuni tidak mau kembali pada keluarganya. Hal ini disebabkan karena :

- a. Konsumsi makanan dan minuman yang teratur
- b. Pemeriksaan kesehatan secara teratur
- c. Komunikasi dan sosialisasi yang harmonis karena merasa senasib sepenanggungan.

9.2. Pelayanan Dinas Sosial Setempat (Hasil kunjungan ke Dinas Sosial)

Hasil kunjungan dan wawancara dengan salah satu pejabat yang berkaitan dengan lansia di Dinas Sosial diperoleh informasi bahwa :

- a. Secara struktural penanganan lansia di Dinas Sosial pada beberapa provinsi yang telah dikunjungi berbeda-beda. Di beberapa provinsi kegiatan lansia ada di bawah eselon IV (Seksi Panti Sosial), sedangkan di provinsi lainnya ada di bawah Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia, Bidang Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial (Bid. Dalkatkesos).
- b. Program yang dilaksanakan Dinas Sosial untuk penduduk lansia masih mengacu pada Departemen Sosial Pusat, yaitu :
 1. Pelayanan sosial lanjut usia dalam panti
 2. Pelayanan sosial lanjut usia luar panti, berupa program untuk :

Lansia yang masih produktif :

- KUBE (Kelompok Usaha Bersama)
- UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

Kedua bantuan tersebut dalam bentuk pemberdayaan usaha yang telah dimiliki oleh kelompok-kelompok lansia yang ada di desa (satu kelompok terdiri dari 5 orang) dan diberikan bimbingan ketrampilan sesuai permintaan mereka serta diberikan bantuan sarana yang diperlukan. Kegiatan mereka dipantau oleh petugas pendamping sosial dari LSM, yayasan atau karang taruna yang ada di lingkungan tempat tinggalnya yang telah bekerjasama dengan Dinas Sosial.

Lansia yang tidak produktif :

- Pertemuan dengan karang lansia
 - Pemberian makanan untuk penambahan gizi
 - Pemeriksaan kesehatan
 - Pengajian
3. Kelembagaan sosial lanjut usia yang berada di provinsi :
 - Lembaga Lansia Indonesia (LLI)
 - Komisi Daerah Lansia (Komda Lansia)

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2006

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	0.28	55.31	2.17	42.24	100.00
Sumatera Utara	0.66	62.45	1.27	35.62	100.00
Sumatera Barat	0.55	56.26	4.27	38.91	100.00
R i a u	0.45	65.06	2.98	31.52	100.00
J a m b i	0.58	65.73	1.41	32.29	100.00
Sumatera Selatan	0.71	65.45	1.72	32.12	100.00
Bengkulu	0.63	65.30	1.87	32.20	100.00
Lampung	0.67	66.24	2.14	30.95	100.00
Bangka Belitung	0.80	62.41	3.02	33.78	100.00
Kepulauan Riau	2.21	61.55	2.39	33.85	100.00
DKI Jakarta	0.91	63.84	2.60	32.65	100.00
Jawa Barat	0.22	65.20	2.29	32.29	100.00
Jawa Tengah	0.43	61.39	1.84	36.35	100.00
DI Yogyakarta	1.75	63.62	1.45	33.18	100.00
Jawa Timur	0.70	56.35	2.12	40.82	100.00
Banten	0.21	63.28	2.24	34.27	100.00
B a l i	3.99	66.23	1.20	28.58	100.00
Nusa Tenggara Barat	0.97	59.86	5.13	34.03	100.00
Nusa Tenggara Timur	2.61	61.50	1.85	34.03	100.00
Kalimantan Barat	1.13	65.20	1.57	32.10	100.00
Kalimantan Tengah	0.75	67.59	1.35	30.31	100.00
Kalimantan Selatan	0.94	54.37	2.80	41.88	100.00
Kalimantan Timur	0.99	61.33	1.49	36.20	100.00
Sulawesi Utara	1.87	67.78	1.73	28.62	100.00
Sulawesi Tengah	1.86	62.95	2.45	32.75	100.00
Sulawesi Selatan	2.99	57.87	2.74	36.40	100.00
Sulawesi Tenggara	1.08	61.17	2.47	35.28	100.00
Sulawesi Barat	2.48	65.26	1.61	30.65	100.00
Gorontalo	1.88	62.19	2.80	33.13	100.00
Maluku	3.06	67.27	1.83	27.84	100.00
Maluku Utara	0.66	64.16	1.51	33.67	100.00
Irian Jaya Barat	0.65	72.59	1.34	25.42	100.00
Papua	1.09	70.64	1.60	26.68	100.00
INDONESIA	0.81	61.39	2.15	35.65	100.00

Sumber : BPS - Susenas 2006

Tabel 7.4.1. Proporsi Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasya Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan, 2

Provinsi	Perkotaan				
	Jenis Kegiatan				
	Keagamaan	Arisan	Sosial	Kematian	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	68.50	14.17	22.83	51.18	20.47
Sumatera Utara	69.50	12.90	26.98	54.55	5.87
Sumatera Barat	54.94	9.26	25.93	54.32	17.28
R i a u	71.82	20.00	38.18	69.09	6.36
J a m b i	64.10	19.23	17.95	55.13	11.54
Sumatera Selatan	55.35	7.55	20.75	57.23	15.09
Bengkulu	47.83	21.74	23.91	67.39	30.43
Lampung	56.52	5.07	14.49	57.25	1.45
Bangka Belitung	17.19	12.50	10.94	25.00	7.81
Kepulauan Riau	59.04	10.84	31.33	43.37	8.43
DKI Jakarta	59.30	19.82	21.80	23.32	7.93
Jawa Barat	64.94	8.09	25.39	29.89	10.56
Jawa Tengah	55.75	31.03	32.38	38.89	10.34
DI Yogyakarta	64.82	59.04	43.13	53.25	7.71
Jawa Timur	58.33	23.15	26.08	49.47	5.61
Banten	59.28	5.39	22.16	26.95	5.99
B a l i	60.14	6.76	28.11	61.92	9.61
Nusa Tenggara Barat	59.20	1.99	22.39	64.18	11.94
Nusa Tenggara Timur	42.47	15.07	16.44	47.95	8.22
Kalimantan Barat	28.14	8.38	10.78	26.35	9.58
Kalimantan Tengah	58.49	24.53	11.32	54.72	9.43
Kalimantan Selatan	50.35	18.18	11.19	40.56	6.99
Kalimantan Timur	40.19	14.02	18.69	46.73	3.74
Sulawesi Utara	88.17	26.88	41.94	70.97	24.73
Sulawesi Tengah	60.00	17.14	5.71	51.43	5.71
Sulawesi Selatan	33.54	9.94	11.80	24.22	4.35
Sulawesi Tenggara	20.59	2.94	17.65	41.18	17.65
Gorontalo	47.83	15.22	15.22	45.65	6.52
Sulawesi Barat	55.26	2.63	15.79	63.16	23.68
Maluku	50.00	5.71	10.00	31.43	-
Maluku Utara	35.00	5.00	-	80.00	10.00
Irian Jaya Barat	77.27	9.09	13.64	50.00	22.73
Papua	66.67	28.57	9.52	4.76	4.76
INDONESIA	58.84	18.44	25.85	41.67	8.77

Sumber : BPS - Susenas Modul 2006

Tabel 7.4.2. Proporsi Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan, 2

Provinsi	Jenis Kegiatan				
	Keagamaan	Arisan	Sosial	Kematian	Lainnya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perdesaan				
Nanggroe Aceh Darussalam	66.87	3.92	29.82	65.06	26.81
Sumatera Utara	66.73	13.46	27.48	65.05	12.15
Sumatera Barat	64.14	5.12	28.08	60.72	15.56
R i a u	70.49	16.94	46.45	66.12	21.86
J a m b i	67.45	16.98	30.66	48.11	22.64
Sumatera Selatan	46.36	6.67	17.88	49.70	15.45
Bengkulu	36.53	5.94	15.53	45.66	6.85
Lampung	63.35	9.55	17.35	46.39	4.48
Bangka Belitung	42.00	5.00	18.00	51.00	15.00
Kepulauan Riau	60.71	14.29	42.86	42.86	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	63.13	3.68	21.10	35.73	13.57
Jawa Tengah	51.89	24.71	29.49	39.03	10.86
DI Yogyakarta	45.59	46.19	37.97	44.25	11.66
Jawa Timur	44.41	18.44	18.91	45.58	5.80
Banten	72.77	1.88	19.72	45.07	12.68
B a l i	55.80	2.46	29.46	51.56	11.38
Nusa Tenggara Barat	54.49	1.40	16.29	51.97	13.76
Nusa Tenggara Timur	45.88	7.89	17.03	48.03	9.68
Kalimantan Barat	45.77	7.87	26.53	40.23	11.08
Kalimantan Tengah	63.58	17.92	11.56	49.13	7.51
Kalimantan Selatan	63.55	15.48	16.13	60.65	8.39
Kalimantan Timur	47.06	12.75	17.65	29.41	7.84
Sulawesi Utara	85.52	19.19	45.45	75.76	16.50
Sulawesi Tengah	51.49	5.53	23.40	43.40	13.62
Sulawesi Selatan	21.15	1.61	5.20	25.63	6.63
Sulawesi Tenggara	30.08	3.38	13.53	38.72	13.91
Gorontalo	33.33	6.67	10.83	36.67	12.50
Sulawesi Barat	45.39	5.26	19.08	32.89	7.89
Maluku	66.46	0.62	11.18	43.48	9.94
Maluku Utara	50.00	5.81	18.60	61.63	20.93
Irian Jaya Barat	71.05	13.16	15.79	26.32	7.89
Papua	66.20	11.27	14.08	46.48	15.49
INDONESIA	53.09	13.54	22.64	44.53	10.67

Sumber : BPS - Susenas Modul 2006

Tabel 7.4.3. Proporsi Penduduk Lansia yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan, 2

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan				
	Jenis Kegiatan				
	Keagamaan	Arisan	Sosial	Kematian	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	67.27	6.41	28.12	61.69	25.27
Sumatera Utara	67.87	13.23	27.27	60.71	9.55
Sumatera Barat	61.88	6.14	27.55	59.15	15.98
Riau	71.00	18.11	43.28	67.26	15.92
Jambi	66.61	17.54	27.48	49.87	19.86
Sumatera Selatan	49.19	6.94	18.78	52.07	15.34
Bengkulu	39.27	9.78	17.56	50.94	12.58
Lampung	61.89	8.59	16.74	48.71	3.83
Bangka Belitung	29.42	8.80	14.42	37.81	11.35
Kepulauan Riau	59.45	11.69	34.17	43.25	6.35
DKI Jakarta	59.30	19.82	21.80	23.32	7.93
Jawa Barat	63.94	5.65	23.02	33.12	12.23
Jawa Tengah	53.29	27.00	30.53	38.98	10.67
DI Yogyakarta	54.45	52.11	40.35	48.40	9.84
Jawa Timur	49.56	20.18	21.56	47.02	5.73
Banten	66.41	3.53	20.87	36.53	9.52
Bali	57.58	4.22	28.91	55.80	10.66
Nusa Tenggara Barat	56.34	1.63	18.68	56.75	13.05
Nusa Tenggara Timur	45.46	8.76	16.95	48.02	9.50
Kalimantan Barat	40.31	8.03	21.65	35.93	10.61
Kalimantan Tengah	62.24	19.66	11.50	50.60	8.02
Kalimantan Selatan	59.28	16.36	14.53	54.15	7.94
Kalimantan Timur	43.90	13.33	18.13	37.36	5.96
Sulawesi Utara	86.29	21.42	44.43	74.37	18.89
Sulawesi Tengah	52.71	7.20	20.86	44.56	12.48
Sulawesi Selatan	24.05	3.56	6.75	25.30	6.10
Sulawesi Tenggara	28.42	3.31	14.25	39.15	14.56
Gorontalo	37.66	9.22	12.14	39.35	10.71
Sulawesi Barat	47.08	4.81	18.52	38.06	10.59
Maluku	61.57	2.13	10.83	39.90	6.99
Maluku Utara	46.93	5.65	14.80	65.39	18.69
Irian Jaya Barat	72.97	11.91	15.13	33.60	12.46
Papua	66.31	15.49	12.97	36.31	12.88
INDONESIA	55.27	15.40	23.86	43.45	9.95

Sumber : BPS - Susenas Modul 2006

Tabel 8.1.1. Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kategori Keterlantaran, 2006

Provinsi	Terlantar	Hampir Terlantar	Tidak Terlantar	Perkotaan
				Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	7.87	19.69	72.44	100.00
Sumatera Utara	4.98	18.77	76.25	100.00
Sumatera Barat	6.79	24.69	68.52	100.00
R i a u	10.91	17.27	71.82	100.00
Jambi	15.38	12.83	71.79	100.00
Sumatera Selatan	9.43	18.87	71.70	100.00
Bengkulu	8.70	28.26	63.04	100.00
Lampung	13.04	21.02	65.94	100.00
Kep Bangka Belitung	4.69	25.00	70.31	100.00
Kepulauan Riau	15.66	20.48	63.86	100.00
DKI Jakarta	9.15	16.31	74.54	100.00
Jawa Barat	10.00	18.99	71.01	100.00
Jawa Tengah	8.62	20.59	70.79	100.00
Dista Yogyakarta	4.34	18.07	77.59	100.00
Jawa Timur	8.61	23.64	67.75	100.00
Banten	11.98	20.36	67.66	100.00
B a l i	5.69	30.25	64.06	100.00
Nusa Tenggara Barat	25.87	38.31	35.82	100.00
Nusa Tenggara Timur	9.59	20.55	69.86	100.00
Kalimantan Barat	6.59	21.55	71.86	100.00
Kalimantan Tengah	16.99	20.75	62.26	100.00
Kalimantan Selatan	15.39	18.88	65.73	100.00
Kalimantan Timur	14.02	22.43	63.55	100.00
Sulawesi Utara	4.30	6.45	89.25	100.00
Sulawesi Tengah	2.86	25.71	71.43	100.00
Sulawesi Selatan	8.07	21.12	70.81	100.00
Sulawesi Tenggara	14.71	20.58	64.71	100.00
Gorontalo	13.04	23.92	63.04	100.00
Sulawesi Barat	7.89	10.53	81.58	100.00
Maluku	5.71	15.72	78.57	100.00
Maluku Utara	0.00	5.00	95.00	100.00
Irian Jaya Barat	13.64	22.72	63.64	100.00
Papua	14.29	14.28	71.43	100.00
INDONESIA	9.20	20.82	69.98	100.00

Sumber : BPS - Susenas Modul 2006

Tabel 8.1.2. Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kategori Keterlantaran, 2006

Provinsi	Perdesaan			
	Terlantar	Hampir Terlantar	Tidak Terlantar	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	16.27	28.01	55.72	100.00
Sumatera Utara	18.32	26.54	55.14	100.00
Sumatera Barat	13.85	21.06	65.09	100.00
R i a u	16.39	28.42	55.19	100.00
Jambi	21.70	30.19	48.11	100.00
Sumatera Selatan	21.52	33.03	45.45	100.00
Bengkulu	27.40	35.16	37.44	100.00
Lampung	22.42	35.67	41.91	100.00
Kep Bangka Belitung	10.00	43.00	47.00	100.00
Kepulauan Riau	25.00	25.00	50.00	100.00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	17.86	25.92	56.22	100.00
Jawa Tengah	12.85	30.54	56.61	100.00
Dista Yogyakarta	18.24	30.49	51.27	100.00
Jawa Timur	18.95	33.27	47.78	100.00
Banten	17.37	24.41	58.22	100.00
B a l i	11.83	38.17	50.00	100.00
Nusa Tenggara Barat	36.24	34.55	29.21	100.00
Nusa Tenggara Timur	53.76	25.45	20.79	100.00
Kalimantan Barat	32.65	34.69	32.66	100.00
Kalimantan Tengah	16.18	26.59	57.23	100.00
Kalimantan Selatan	18.06	34.84	47.10	100.00
Kalimantan Timur	16.67	30.39	52.94	100.00
Sulawesi Utara	13.47	24.24	62.29	100.00
Sulawesi Tengah	28.51	27.66	43.83	100.00
Sulawesi Selatan	17.92	31.72	50.36	100.00
Sulawesi Tenggara	24.81	30.83	44.36	100.00
Gorontalo	31.67	28.33	40.00	100.00
Sulawesi Barat	13.16	34.21	52.63	100.00
Maluku	9.94	24.22	65.84	100.00
Maluku Utara	32.56	30.23	37.21	100.00
Irian Jaya Barat	26.32	34.21	39.47	100.00
Papua	50.70	26.76	22.54	100.00
INDONESIA	18.98	30.17	50.84	100.00

Sumber : BPS - Susenas Modul 2006

Tabel 8.1.3. Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kategori Keterlantaran, 2006

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan			
	Terlantar	Hampir Terlantar	Tidak Terlantar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	14.23	25.99	59.78	100.00
Sumatera Utara	12.81	23.33	63.86	100.00
Sumatera Barat	12.12	21.95	65.93	100.00
R i a u	14.29	24.14	61.57	100.00
Jambi	20.12	25.83	54.05	100.00
Sumatera Selatan	17.72	28.58	53.70	100.00
Bengkulu	22.85	33.49	43.66	100.00
Lampung	20.41	32.54	47.05	100.00
Kep Bangka Belitung	7.31	33.87	58.82	100.00
Kepulauan Riau	17.97	21.60	60.43	100.00
DKI Jakarta	9.15	16.31	74.54	100.00
Jawa Barat	14.35	22.82	62.83	100.00
Jawa Tengah	11.32	26.93	61.75	100.00
Dista Yogyakarta	11.83	24.77	63.40	100.00
Jawa Timur	15.13	29.70	55.17	100.00
Banten	14.83	22.50	62.67	100.00
B a l i	9.32	34.93	55.75	100.00
Nusa Tenggara Barat	32.18	36.02	31.80	100.00
Nusa Tenggara Timur	48.37	24.85	26.78	100.00
Kalimantan Barat	24.57	30.62	44.81	100.00
Kalimantan Tengah	16.39	25.06	58.55	100.00
Kalimantan Selatan	17.20	29.67	53.13	100.00
Kalimantan Timur	15.45	26.74	57.81	100.00
Sulawesi Utara	10.81	19.07	70.12	100.00
Sulawesi Tengah	24.82	27.38	47.80	100.00
Sulawesi Selatan	15.62	29.23	55.15	100.00
Sulawesi Tenggara	23.05	29.04	47.91	100.00
Gorontalo	26.10	27.02	46.88	100.00
Sulawesi Barat	12.26	30.16	57.58	100.00
Maluku	8.68	21.70	69.62	100.00
Maluku Utara	25.89	25.07	49.04	100.00
Irian Jaya Barat	22.41	30.68	46.91	100.00
Papua	41.82	23.72	34.46	100.00
INDONESIA	15.28	26.63	58.09	100.00

Sumber : BPS - Susenas Modul 2006

<http://www.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik

Jl. dr. Sutomo No. 6 - 8, Kotak Pos 1003, Jakarta - 10010
Telepon : 3841195, 3842508, 3810291 - 5
Telex : 45159, 45169, 45325, 45375, 45385
Fax : 3857046, E-mail : bpsHQ@bps.go.id
Homepage : <http://www.bps.go.id>

ISBN 978-979-724-600-6

